



**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 02 /PER/ M.KOMINFO/1/2010**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TAHUN 2010-2014**

**MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Kementerian Negara/ Lembaga harus menyusun Rencana Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 84/P Tahun 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN 2010 - 2014.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, selanjutnya disebut Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang komunikasi dan informatika yang merupakan dasar dan acuan pelaksanaan pembangunan komunikasi dan informatika selama 5 (lima) tahun ke depan mulai dari tahun 2010.

Pasal 2

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, selengkapnya terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam:

- a. penyempurnaan Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I dan II;
- b. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2010-2014;
- c. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan, dan pengendalian pelaksanaan anggaran tahunan;
- d. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- e. pelaksanaan evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pasal 4

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika melalui Sekretaris Jenderal.

Pasal 5

Dalam hal terjadi perubahan pada lingkungan strategis, maka Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 dapat dilakukan perubahan dan/atau penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 29 Januari 2010.

MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



TIFATUL SEMBIRING

1. Sekretaris Jenderal	Paraf : 
2. Kepala Biro Perencanaan	Paraf : 
3. Kepala Biro Hukum dan KLN	Paraf : 

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Perkembangan dunia di akhir abad ke dua puluh ditandai dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat sehingga menghasilkan suatu revolusi teknologi baru, setelah teknologi mesin uap dan teknologi tenaga listrik. Dikatakan sebagai suatu revolusi karena merupakan suatu teknologi serba-guna (*general purpose technology*) yang berpengaruh terhadap teknologi-teknologi lain serta menyebabkan perubahan tatanan yang cukup mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teknologi ini masih berkembang pesat dan dipercaya belum kelihatan titik jenuhnya dalam beberapa dekade mendatang. Perkembangan tersebut sangat menggembirakan karena kemampuan teknologi yang semakin meningkat membawa dampak antara lain pada penurunan harga yang semakin drastis. Dengan demikian pemanfaatannya menjadi semakin layak dan semakin jauh merasuki kegiatan manusia dan organisasi, mengubah pola kehidupan dan pola kerja, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan mempengaruhi tatanan sosial.

Teknologi informasi, yang sebenarnya merupakan suatu perpaduan sejumlah teknologi, telah memungkinkan terjadinya *internetworking* yang menyebabkan faktor jarak dan waktu menjadi kurang berarti. Informasi dapat mengalir dari satu tempat ke tempat yang lain dengan kecepatan cahaya dan dapat dimanfaatkan untuk konsolidasi, koordinasi, dan kolaborasi yang mampu menghasilkan tindakan-tindakan dengan pertimbangan keuntungan skala global. Melalui *internetworking* tersebut dapat disebarkan informasi dalam jumlah besar secara gencar untuk membentuk opini publik secara global terhadap suatu tindakan yang telah, sedang dan akan dilakukan untuk menghasilkan manfaat yang sepenuhnya dikendalikan oleh penyebar informasi. Teknologi informasi telah membawa dunia menuju ke era informasi, di mana informasi merupakan salah satu sumber daya paling penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk tujuan-tujuan tertentu yang menguntungkan pelakunya. Dengan kecepatan pengumpulan dan penyebarannya yang sangat tinggi, informasi sangat mungkin difungsikan sebagai suatu senjata strategis dalam memenangkan persaingan global. Informasi berada pada garda depan dalam pertempuran kompetisi, mendahului aset-aset yang lain.

Informasi yang dikumpulkan dan dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan darimana informasi tersebut dikumpulkan. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan ini dapat dipergunakan untuk memberikan nilai tambah kepada produk,

organisasi, bahkan negara. Modal alam akan memiliki nilai berlebih apabila disertakan di dalamnya modal pengetahuan yang sesuai dengan modal alam tersebut. Hal yang sama akan berlaku pada modal sosial/budaya. Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat akan menambah nilai modal alam dan modal sosial/budaya yang dimiliki negara, yaitu dengan mencangkokkan modal pengetahuan ke dalam produk atau jasa yang dihasilkan/ditawarkan. Teknologi informasi akan sangat membantu kegiatan aktualisasi pengetahuan ini dalam skala luas oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian akan terbentuk masyarakat berbasis pengetahuan dengan daya saing tinggi karena mampu memberikan nilai tambah pada tiap kegiatan yang dilakukannya.

Informasi yang dikelola dan dikomunikasikan dengan baik akan dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi yang melakukannya. Sejalan dengan perkembangan teknologinya, peran komunikasi publik menjadi semakin dominan dalam usaha mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, membentuk opini publik, dan menjalankan fungsi-fungsi demokrasi dalam bernegara. Kegiatan komunikasi massa yang dilakukan untuk penyebaran informasi melalui segala macam media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat. Keterhubungan ini bukan hanya pada tingkatan teknis saja, yang terbentuk dari elemen pengirim, penerima dan kandungan informasi yang dikomunikasikan, tetapi lebih kepada komunikasi pada tingkatan semantik dan perilaku. Komunikasi massa memiliki peran strategis sebagai komplemen dari teknologi informasi yang banyak berperan pada tingkatan teknis. Dengan demikian teknologi informasi dan komunikasi menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk mewujudkan masyarakat berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk memenangkan persaingan global.

Dalam memenangkan persaingan yang makin mengglobal, pengelolaan komunikasi dan informatika sebagai pengetahuan (*knowledge*) secara tepat, akan mampu mendukung perwujudan kapabilitas nasional yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi dan informatika yang ditopang oleh kemampuan menghasilkan dan menggunakan produk dalam negeri yang berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan anak bangsa. Penciptaan produk-produk, baik berupa perangkat, jasa, ataupun konten yang berkualitas dengan didukung oleh iklim industri yang sehat dan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat, dapat menghasilkan suatu sistem ekonomi pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan keunggulan nasional untuk memasuki pasar dunia di bidang komunikasi dan informatika. Dalam tataran ini berfungsi sebagai eksekutor dan juga regulator yang mendorong penyelenggara untuk menggunakan produk dalam negeri.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang demikian pesat telah mendorong peran strategis informasi sebagai suatu modal dasar pembangunan.

Berbagai potensi keunggulan lokal bangsa Indonesia seperti : keindahan alam Indonesia, iklim, sumber daya hayati baik pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan, sumber daya mineral dan pertambangan, dan penduduk Indonesia yang beragam etnik, budaya, agama dan bahasa, bila dikemas sebagai suatu produk informasi yang tepat akan menjadi sumber kegiatan ekonomi yang tiada batasnya dan memiliki daya saing tinggi. Keunggulan khas Indonesia tersebut, perlu digali dan dikembangkan menjadi semacam *National Information Database*, yang dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi pertumbuhan sektor-sektor yang lain dan pada akhirnya dapat memajukan kesejahteraan bangsa.

Sebagaimana informasi yang merupakan hasil olahan data dari berbagai sumber dapat menjadi modal dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan masyarakat dari berbagai sektor tersebut bila dikembangkan secara sistematis dan terus-menerus dapat menghasilkan suatu *backbone* ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan modal dasar bagi pembentukan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan, atau dikenal sebagai *Knowledge Base Society*. Seluruh capaian/produk budaya bangsa Indonesia baik yang berupa produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk pengembangan budaya tradisional dan keunggulan lokal, produk-produk hasil pengembangan sumber daya alam merupakan suatu bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan bangsa. Suatu upaya untuk mendorong bangsa Indonesia menjadi suatu masyarakat berbasis ilmu pengetahuan tersebut dapat mensejajarkan bangsa Indonesia menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang telah maju, dengan kapabilitas nasional untuk secara setara saling bertukar ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi negaranya masing-masing.

Bangsa secara umum dibentuk berdasar atas asas kesamaan falsafah kehidupan, kesamaan nasib, kesamaan budaya, dan kesamaan teritori/ wilayah. Dengan melihat bangsa Indonesia sebagai suatu bangsa yang besar, dengan beragam etnis/suku, budaya, bahasa, agama dan dengan wilayah yang begitu luas, maka semangat yang dibangun pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dipelihara secara terus menerus sebagai bagian yang tidak terelakkan untuk menjaga keberlangsungan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pembentukan kesamaan persepsi atau sudut pandang tentang perlunya rasa kesatuan dan persatuan dalam suatu bangsa (*Nation Unity*) dapat dilaksanakan melalui upaya terus menerus melalui penyebaran informasi faktual dan berimbang. Dengan adanya arus komunikasi dan informatika yang dipelihara secara terus menerus tersebut, meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beragam etnis / suku, budaya, bahasa, agama dan tingkat ekonomi yang berbeda, maka rasa kebersamaan sebagai suatu bangsa tetap dapat terjaga. Sebaliknya, adanya informasi yang *a-symetry* akan menghasilkan suatu perbedaan sudut pandang yang sangat besar, rasa curiga dan prasangka di antara kelompok masyarakat, rasa kompetisi yang tidak sehat dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu perpecahan bangsa.

Sebagai suatu bangsa yang berada di tengah percaturan hubungan antar bangsa yang bersifat global, maka masing-masing bangsa membutuhkan keunggulan agar mampu bersaing dalam era kompetisi global tersebut. Komunikasi dan informatika merupakan salah satu modal dasar yang sangat potensial dalam mendorong bangsa tersebut untuk tetap menjadi bangsa yang dihormati dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Peran strategis komunikasi dan informatika tersebut ditunjukkan oleh kemampuan bangsa tersebut untuk mengenal kekuatan dan kelemahan dari bangsanya sendiri, kemampuan untuk melihat peluang dan ancaman dalam setiap berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain, serta mampu membangun posisi tawar yang lebih baik dalam setiap perundingan. Bila dalam kondisi konflik yang dapat berakibat pada peperangan antar bangsa, maka komunikasi dan informatika dapat menjadi suatu alat untuk membangun strategi dalam memenangkan suatu peperangan. Bangsa Indonesia terletak pada posisi geografis yang bersifat strategis pada percaturan politik antar bangsa-bangsa Asia, Australia dan Amerika, perlu membangun suatu kapabilitas nasional yang ditopang oleh sistem komunikasi dan informatika yang lebih canggih. *Backbone* komunikasi dan informatika tersebut akan sangat menentukan penggunaan sumber daya nasional secara optimal dan pemilihan strategi yang tepat dalam berinteraksi dengan bangsa-bangsa yang lain.

Sistem demokrasi yang dibentuk berdasarkan kesamaan hak atas setiap warga negara untuk menyuarakan pendapatnya dalam kerangka terwujudnya kesatuan dan persatuan bangsa merupakan suatu bentuk demokrasi yang sehat. Peran strategis komunikasi dan informatika dalam hal ini adalah menyerap informasi yang berkembang di masyarakat, mengolah dan menyebarkan informasi tersebut kembali ke masyarakat dalam bentuk informasi yang faktual dan berimbang merupakan suatu prasyarat mutlak bagi suatu bangsa untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat dalam iklim demokrasi yang sehat. Dengan majunya sistem komunikasi dan informatika masyarakat dan tingginya kemampuan masyarakat dalam menarik kesimpulan dari informasi tersebut akan mendorong partisipasi aktif masyarakat pada setiap proses demokrasi, dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu kerangka pendapat umum untuk menentukan masa depan bangsa.

Pentingnya informasi bagi setiap warganegara telah dipahami oleh negara sebagai suatu hak yang harus diberikan kepada masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam UUD 1945. Oleh sebab itu, maka infrastruktur komunikasi dan informatika mutlak harus dibangun oleh negara, sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsanya. Di masa depan, informasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat diikuti oleh setiap anggota masyarakat. Pemberian hak untuk ikut berperan serta dalam pencarian, pengolahan dan penyebaran informasi perlu diimbangi dengan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari anggota masyarakat suatu negara yang berdaulat. Sehingga dapat tercipta suatu iklim distribusi informasi yang sehat dan mampu mendorong terciptanya masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing yang tinggi. Hak

warga negara untuk memperoleh informasi yang sama tersebut dapat mewujudkan kebersamaan nasib sebagai suatu bangsa, dan dorongan untuk mewujudkan hak untuk berperan serta dalam memajukan bangsanya secara keseluruhan.

Untuk dapat dimanfaatkan, informasi harus dialirkan dari sumber-sumber informasi kepada para penggunanya dengan ketentuan memenuhi prasyarat di atas. Adanya pemasok dan pengguna yang berbeda lokasi, berbeda kemampuan, berbeda kondisi sosial-ekonomi-budaya menyebabkan perlunya media/kanal dan metode komunikasi yang harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari pengirim, pengguna dan kandungan informasi. Peran komunikasi adalah untuk menciptakan iklim yang memungkinkan terjadinya aliran informasi yang demokratis, yaitu mampu memberikan informasi yang netral terhadap kepentingan pihak tertentu, dan seimbang terhadap keragaman pasokan dan kebutuhan informasi.

Dalam usaha menekan ketidakpastian yang dihadapi oleh masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi, sosial, politik yang dilaksanakannya, baik sebelum maupun sesudah diterimanya informasi, maka penciptaan sistem komunikasi yang demokratis dalam suatu negara mutlak diperlukan untuk dapat memberdayakan masyarakat dalam pemanfaatan informasi. Pemerintah diperlukan untuk berperan sebagai eksekutor dan regulator dalam menciptakan sistem komunikasi yang demokratis tersebut.

Sebagai eksekutor, pemerintah menyediakan ruang dan saluran yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh elemen masyarakat. Sebagai regulator pemerintah juga dapat mengharuskan pihak swasta dalam berperan melaksanakan komunikasi publik yang sesuai dengan tujuan mencerdaskan bangsa.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, masyarakat informasi Indonesia diproyeksikan terwujud pada periode jangka menengah ketiga, yaitu tahun 2015-2019. Penetapan sasaran ini didasarkan pada kenyataan bahwa kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, dan memanfaatkan informasi mutlak dimiliki oleh suatu bangsa tidak saja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya saing bangsa tersebut, tetapi juga untuk meningkatkan taraf dan kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mencapai sasaran tersebut, ketersediaan infrastruktur informasi yang memadai, baik jumlah akses, kapasitas, kualitas maupun jangkauan, merupakan persyaratan utama dan harus dimanfaatkan secara optimal, bukan saja sebagai alat komunikasi tetapi juga sebagai alat yang menghasilkan peluang ekonomi dan kesejahteraan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

2004-2009, pembangunan pos dan telematika tahun 2004-2009 difokuskan kepada tiga agenda utama, yaitu :

- 1) Reformasi sektor yang bertujuan untuk menciptakan efisiensi dalam penyelenggaraan pos dan telematika, kompetisi level playing field, dan iklim investasi yang kondusif;
- 2) Pengembangan infrastruktur *pos*, telekomunikasi, media, informatika yang bertujuan untuk menyediakan infrastruktur dan layanan yang berkualitas di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah non komersial dalam rangka memperkecil kesenjangan digital (*digital divide*) dan menjamin kelancaran arus informasi; serta
- 3) Pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang lebih transparan dan efisien, meningkatkan e-literasi dan kemampuan industri dalam negeri dalam memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi TIK, serta mewujudkan keabsahan, keamanan, dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan TIK.

Pada awal tahun 2005 pemerintah telah melakukan penataan ulang kelembagaan eksekutif yang menangani pos dan telematika melalui penggabungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang sebelumnya berada dalam lingkup Kementerian Perhubungan, dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Lembaga Informasi Nasional menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika. Tujuan yang ingin dicapai dari penggabungan tersebut, antara lain untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang mengarah kepada konvergensi, selain itu juga untuk mengefisienkan pelayanan public di bidang perijinan penyiaran yang terkait dengan pelayanan perijinan di bidang pos dan telekomunikasi.

Sejak terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika, sejumlah program pembangunan di bidang komunikasi dan informatika telah dilaksanakan sebagai berikut:

Capaian Program Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004-2009

Pada periode RPJMN 2004-2009 telah dibangun fondasi kuat dalam pelaksanaan agenda reformasi sektor di antaranya melalui :

- 1) Penetapan UU Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos, sebagai pengganti UU No. 6 Tahun 1984 dan RUU di era Konvergensi sebagai pengganti UU No. 36 Tahun 1999 ke depan;
- 2) Pengakhiran bentuk duopoli pada penyelenggaraan telekomunikasi Sambungan Langsung Internasional (SLI) dan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) masing-masing pada tahun 2007 dan 2008 serta diselesaikannya pembayaran kompensasi kepada PT Telkom atas pengakhiran hak eksklusivitas pada penyelenggaraan telekomunikasi lokal dan SLJJ;

- 3) Perkuatan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai regulator di sektor telekomunikasi;
- 4) Implementasi interkoneksi berbasis biaya yang menghilangkan hambatan (*barrier to entry*) bagi penyelenggara baru dan mendorong terjadinya penurunan tarif;
- 5) Penataan ulang industri penyiaran melalui pengelompokan penyelenggara penyiaran menjadi Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, Lembaga Penyiaran Berlangganan, dan Lembaga Penyiaran Komunitas.

Terkait agenda pengembangan infrastruktur, sepanjang tahun 2004-2009 telah dilakukan :

- 1) Penyediaan jasa pos di 2.341 kantor pos cabang luar kota melalui program *Public Service Obligation (PSO)* dan dimulainya penyediaan jasa telekomunikasi di 31.824 desa dan jasa akses internet di 4.217 kecamatan melalui program *Universal Service Obligation (USO)*;
- 2) Pembukaan peluang usaha untuk penyelenggaraan telekomunikasi sambungan bergerak generasi ketiga (3G), SLJJ, SLI, dan akses nirkabel berpita lebar (*broadband wireless access*);
- 3) Fasilitasi pembangunan jaringan tulang punggung (*backbone*) telekomunikasi nasional serat optik Palapa Ring;
- 4) Pembukaan kode akses SLJJ di Balikpapan yang memungkinkan terjadinya *customer sharing* antar penyelenggara;
- 5) Penyelesaian proyek pengembangan infrastruktur penyiaran RRI di 138 kabupaten/kota blank spot yang tersebar di 28 provinsi;
- 6) Dimulainya pembangunan pemancar TVRI di 25 lokasi terpencil, perbatasan, dan blank spot melalui proyek *Improvement of TV Transmitting Stations Phase-I*;
- 7) Dimulainya migrasi sistem penyiaran dari analog ke digital melalui penetapan *Digital Video Broadcasting (DVB)* sebagai standar penyiaran TV digital yang dilanjutkan dengan uji coba implementasi TV digital secara *simulcast* (siaran bersama dengan sistem analog);
- 8) Rehabilitasi fasilitas dan peningkatan jangkauan penyiaran televisi ke daerah blankspot melalui proyek PHLN : *Improvement of TV Transmitting Stations (ITTS)* – Loan Spanyol;
- 9) Penguatan Pemancar RRI Daerah;
- (10) Pengembangan Sistem Manajemen Perijinan Bidang Penyiaran (SIMP);

Selain hal-hal tersebut di atas, pencapaian sepanjang tahun 2004 hingga tahun 2008 menghasilkan pertumbuhan teledensitas *fixed line* (termasuk *fixed wireless access*) sebesar 156% yaitu dari 4,79% menjadi 11,49%, pertumbuhan seluler sebesar 358% (14,02% menjadi 61,72%), dan pertumbuhan pengguna internet sebesar 101% (5,61% menjadi 11,3%) (Tabel 1). Di sektor penyiaran, jangkauan penyiaran radio publik (RRI) terhadap populasi mengalami peningkatan yaitu dari 66% menjadi 85% sedangkan televisi publik (LPP TVRI) menurun tajam yaitu dari 81% menjadi 60%.

Tabel 1 :
Teledensitas Akses Telekomunikasi Indonesia
Tahun 2004 – 2008 (%)

	2004	2005	2006	2007	2008
Telepon Tetap*	4,79	6,16	6,67	8,68	11,49
Telepon Bergerak	14,02	21,44	28,73	41,52	61,72
Pengguna Internet	5,61	7,18	7,18	6,51	11,3

(*) *Telepon tetap terdiri dari fixed line (Public Switched Telephone Network atau PSTN) dan FWA*

Sumber: International Telecommunications Union (ITU), 2007 dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2008

Hingga akhir tahun 2008, tingkat kepemilikan komputer pada rumah tangga masih sangat rendah yaitu hanya 4,40% dengan distribusi sebagai berikut: Jawa sebesar 5,30%, Sumatera sebesar 2,90%, Bali dan Nusa Tenggara sebesar 2,90%, Kalimantan sebesar 4,50%, Sulawesi sebesar 2,70%, serta Maluku dan Papua sebesar 2,10%. Disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia masih besar. Hingga akhir tahun 2008 masih terdapat lebih dari 31 ribu desa belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet, lebih dari 80% infrastruktur pos dan telematika terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatera, serta distribusi *Internet Service Provider (ISP)* terkonsentrasi di Jawa (64% dari 306 ISP) dan 18% di Sumatera.

Di bidang komunikasi dan informatika sepanjang tahun 2004-2009 telah dilakukan peningkatan layanan informasi publik dalam rangka pelaksanaan sosialisasi program dan kebijakan kabinet Indonesia Bersatu antara lain: dalam penanggulangan kemiskinan, kenaikan harga BBM, PEMILU dan lain sebagainya.

Terkait dengan implementasi UU KIP, kegiatan yang dilakukan adalah kerjasama kelembagaan dengan berbagai organisasi media antara lain:

- 1) Kerjasama kelembagaan dengan KPI, Dewan Pers dan LKBN Antara.
- 2) Penyiapan lembaga pengelola dan pelayan informasi publik di lingkungan instansi pemerintah atau organisasi publik.
- 3) Pembentukan Komisi Informasi Pusat dan Daerah.
- 4) Peningkatan kapasitas SDM bidang Komunikasi, Layanan Informasi dan Penyiaran (media).
- 5) Penguatan peran kelembagaan komunikasi sosial.

Pengembangan sarana komunikasi sosial utamanya media tradisional sangat penting bagi pengembangan akses komunikasi masyarakat melalui pendekatan dan pemanfaatan kearifan lokal. Pembangunan dan pengembangan *Media Center* di daerah dan fasilitasi kegiatan untuk propinsi dan kabupaten/kota secara terseleksi, akan meningkatkan arus komunikasi dan informatika antara pusat dengan daerah dan penyebaran informasi isu-isu strategis.

Isu utama dalam pembangunan penyiaran adalah penataan industri penyiaran. UU no. 32/2002 tentang penyiaran disahkan pada tanggal 28 Desember 2002, namun pada tanggal 12 Maret 2003 terdapat permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi oleh Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), Asosiasi Televisi Siaran Indonesia (ATVSI), Persatuan Sulih Suara Indonesia (PERSUSI) dan Komunitas Televisi Indonesia (KOMTEVE). Keputusan Mahkamah Konstitusi atas *judicial review* tersebut baru ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2004, yang intinya adalah bahwa UU 32/2002 tentang penyiaran tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pada tahun 2005 Pemerintah menerbitkan 7 Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksanaan dari UU No. 32/2002 tentang Penyiaran, namun dalam perjalanannya 3 diantara PP tersebut yaitu PP 49/2005 tentang Pedoman Kegiatan Peliputan Lembaga Penyiaran Asing, PP No: 50/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta dan PP 52/2005 Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan juga dilakukan *judicial review* oleh Komisi Penyiaran Indonesia. Keputusan Mahkamah Agung atas *judicial review* tersebut baru ditetapkan pada tanggal 19 April 2007 yang intinya adalah menolak Permohonan Hak Uji Materiil (*judicial review*) dari Wakil Ketua KPI tersebut, kondisi ini menyebabkan pelayanan kepada masyarakat khususnya kepada industri penyiaran tidak dapat dilakukan secara optimal sehingga menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi industri penyiaran itu sendiri. Dalam lima tahun kedepan Penataan industri penyiaran masih merupakan isu penting, terutama dalam mengantisipasi akan terjadinya konvergensi untuk mendorong adanya efisiensi bagi industri penyiaran (*streamlining*).

Terkait dengan agenda pemanfaatan dan pengembangan TIK, sepanjang tahun 2004-2009 telah dilakukan :

- 1) Penyediaan jasa akses internet di beberapa kecamatan di antaranya melalui *Community Access Point* (CAP), *Mobile CAP* (MCAP), dan warung masyarakat informasi;
- 2) Pembentukan *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure* (ID-SIRTII) yang melakukan pengawasan dan pengamanan jaringan internet Indonesia;
- 3) Pengesahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang merupakan undang-undang pertama di bidang TIK;
- 4) Dimulainya penyusunan RUU *Cyber Crime* dan RUU Ratifikasi *Convention on Cyber Crime*;
- 5) Pembangunan model implementasi *e-government* dan pengesahan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah (*e-Government*);
- 6) Pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan bidang TIK untuk meningkatkan e-literasi aparatur pemerintah, pekerja, dan masyarakat

melalui proyek *National ICT Human Resource Development dan Establishment of Vocational Training Center in the Field of ICT*;

- 7) Penandatanganan nota kesepakatan oleh 18 kepala Kementerian/ Lembaga dalam acara *Indonesia Go Open Source (IGOS) Summit 2* sebagai bentuk komitmen dalam memajukan pengembangan *open source software (OSS)* nasional;
- 8) Penyelesaian proyek percontohan *e-government* di Batam bekerja sama dengan Otorita Batam dan *e-local government* bekerja sama dengan Pemkab Minahasa Selatan, Pemprov Kalimantan Timur, Pemkot Magelang, dan Pemkab Solok.

1.2. Potensi dan Permasalahan

1.2.1. Tantangan yang dihadapi Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004 -2009:

1) Digital Divide Tinggi

Negara Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau dengan situasi geografis dan populasi penduduk yang heterogen baik dari segi sosial ekonomi, politik, budaya maupun agama, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya adalah kesenjangan digital (*digital divide*). Hal tersebut dapat terlihat dari kondisi sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antara mereka yang dapat mengakses dunia digital dan teknologi informasi dengan mereka yang terbatas aksesnya atau tidak memiliki akses sama sekali ;
- b. Kesenjangan atau kesenjangan antara mereka yang mendapat keuntungan dari teknologi dan mereka yang tidak mendapatkannya.

Gambaran *digital divide* tersebut terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Presentasi yang memiliki telepon di Jawa Tengah masih 6.98%, di NTB bahkan masih 4.54% sementara di Jakarta 38.5% dan DIY 13.1%.
- b. Dari total 72,000 desa yang ada di Indonesia masih ada 31,824 desa yang belum terlayani akses telepon.
- c. *Penetrasi kepemilikan PC Indonesia masih 4.4 %, tertinggal jauh bahkan dengan Thailand (pada akhir tahun 2008).*

2) Informasi Edukatif Kurang

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diperoleh data bahwa 10 (sepuluh) dari 75 (tujuh puluh lima) judul tayangan TV merupakan tayangan bermasalah ditinjau dari isi siaran yang tidak mempunyai nilai pendidikan bagi masyarakat. Tayangan tersebut

terutama dihasilkan oleh media TV, mempunyai dampak lebih besar dalam penyampaian informasi. Hasil evaluasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) terhadap tayangan-tayangan yang ada pada media TV, selama tahun 2008 memperlihatkan masih banyak tayangan yang berisi kekerasan (fisik, sosial dan psikologis), pelecehan terhadap kelompok masyarakat maupun individu, penganiayaan terhadap anak, serta tidak sesuai dengan norma kesopanan dan kesusilaan.

Mengingat pentingnya informasi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maka diperlukan upaya yang proporsional dalam mengolah dan memanfaatkan informasi secara tepat dan cepat melalui proses komunikasi yang seimbang yang dilakukan oleh seluruh lembaga komunikasi pemerintah, masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

3) Infrastruktur Akses Informasi Lemah

Disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia masih besar. Hingga akhir tahun 2008 masih terdapat lebih dari 31 ribu desa belum memiliki fasilitas telekomunikasi dan internet, lebih dari 80% infrastruktur pos dan telematika terkonsentrasi di Jawa, Bali, dan Sumatera, serta distribusi *Internet Service Provider (ISP)* terkonsentrasi di Jawa (64% dari 306 ISP) dan 18% di Sumatera.

Selain isu terbatasnya ketersediaan dan aksesibilitas layanan pos dan telematika, kondisi lain yang dihadapi sektor ini adalah belum optimalnya tingkat pemanfaatan informasi yang di antaranya terlihat dari masih terbatasnya penggunaan TIK dalam kegiatan perekonomian masyarakat yang menghasilkan *real economic value* dan meningkatnya penyalahgunaan (*misuse dan abuse*) penggunaan TIK.

Infrastruktur yang masih lemah, ditandai dengan teledensitas yang masih rendah. Dimana teledensitas di Indonesia masih berkisar 5-6% dibandingkan dengan Malaysia yang berada dikisaran 20% dan Singapura sekitar 50%.

Sementara mengenai kapasitas infrastruktur hingga tahun 2008 yaitu, kapasitas pos pada tahun 2007 antara lain Gedung Kantor Pos berjumlah 3.549 unit, Pelayanan Bergerak mencapai 3.512 unit. Sedangkan untuk kapasitas telekomunikasi pada tahun 2008 yang terwujud antara lain jumlah pelanggan telepon tetap sebanyak 30 juta pelanggan, sedangkan untuk telepon bergerak berjumlah 140 juta pelanggan. Adapun Internet, pada tahun 2008 mencapai jumlah pengguna 30 juta orang dan pelanggan 3,1 juta orang.

Dalam hal jangkauan infrastruktur hingga tahun 2008, sebagian besar jangkauan akses telekomunikasi masih terdapat di Sumatera dan Jawa, terlihat di tabel 2.

Tabel 2:
Jaringan Infrastruktur

Daerah	Wilayah USO		Coverage Jaringan Telkomsel Existing1)		Coverage Jaringan Telkom Existing2)	
	Jml Kec	Jml Desa	Kec	Desa	Kec	Desa
Sumatera	1251	13312	72%	68%	67%	16%
Jawa	1233	4574	91%	91%	60%	43%
Bali, NTB, NTT	308	2368	77%	46%	19%	0%
Kalimantan	459	3797	55%	36%	15%	4%
Sulawesi	706	4758	51%	27%	32%	15%
Papua	260	3015	13%	3%	5%	0%
NASIONAL	4217	31824	69%	54%	46%	16%

Sumber Data: (1) Telkomsel, September 2008
(2) Indikator TIK 2008, BPPT

Secara wilayah geografis Indonesia berbentuk kepulauan dan memiliki dataran tinggi maupun dataran rendah yang cukup banyak dan sulit dijangkau sehingga menyebabkan terjadi banyaknya daerah blank spot atas komunikasi dan informatika. Apabila kondisi daerah blank spot dibiarkan/tidak ditangani secara prosedural maka akan memperbesar kesenjangan akses informasi antara daerah yang sulit dijangkau dengan daerah yang tersentuh pembangunan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika. Untuk memperkecil jumlah daerah *blank spot*, perlu dilakukan upaya-upaya membangun kerjasama antar lembaga komunikasi dan informatika, dan lembaga media baik cetak maupun elektronik. Hal ini ditujukan untuk memperluas jaringan informasi di daerah *blank spot* termasuk pembangunan infrastruktur pos dan telekomunikasi serta penyiaran. Penghapusan daerah *blank spot* juga dilakukan melalui pembangunan fasilitas telekomunikasi perdesaan (USO) secara bertahap yang dimulai dengan desa berdering, desa pintar dan desa informasi.

Keterbatasan kemampuan pembiayaan pemerintah di bidang infrastruktur sangat dirasakan, sehingga diperlukan sumber pembiayaan lain di luar pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika. Namun demikian saat ini masih terdapat hambatan dalam penyelenggaraan yang menyebabkan belum optimalnya upaya mobilisasi sumber pembiayaan di luar pemerintah (swasta), terutama untuk penyediaan infrastruktur dan layanan di daerah non komersial, sehingga membuat pembagian resiko investasi anatar pemerintah dan swasta tidak terjadi.

Mengingat terbatasnya sumberdaya yang dimiliki, termasuk sumber pembiayaan, maka akan ditempuh langkah-langkah peningkatan efisiensi

baik dalam pemanfaatan infrastruktur yang ada maupun pembangunan infrastruktur baru, seperti optimasi pemanfaatan infrastruktur secara umum yang berpotensi untuk digunakan dalam penyelenggaraan komunikasi dan informatika, serta pemakaian bersama suatu infrastruktur oleh beberapa penyelenggara (*resource sharing*).

Ke depan, pembangunan kapasitas infrastruktur akan disinergikan dengan pengembangan industri aplikasi telematika, selain itu juga akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penggunaan kandungan lokal baik dalam rangka pengeluaran biaya investasi (*CAPEX*) maupun dalam rangka pengeluaran biaya operasi (*OPEX*) dari setiap penyelenggara telekomunikasi.

4) Pembangunan TIK Lemah dan Layanan Informasi Kurang

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) secara nasional masih lemah yang antara lain ditandai dengan masih kurangnya infrastruktur, rendahnya penggunaan TIK dan tingkat melek masyarakat. Menurut *International Telecommunication Union (ITU)* pembangunan TIK berindikasi tidak hanya kesiapan infrastruktur (akses terhadap informasi) tetapi juga penggunaan TIK dan beberapa besar tingkat melek TIK sumber daya manusianya. Dibandingkan dengan 154 negara-negara lain di dunia, data dari ITU pada tahun 2007 menempatkan Indonesia pada ranking 108.

Kondisi tersebut menuntut dilakukannya usaha peningkatan kualitas dan kuantitas serta kemampuan infrastruktur TIK yang makin meningkat dan terjangkau oleh masyarakat pengguna TIK. Dengan upaya tersebut akan mampu meningkatkan kapasitas SDM dan masyarakat dalam memanfaatkan jasa akses telekomunikasi dan TIK yang secara ekonomi akan meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat.

Dalam definisi World Bank, penggunaan teknologi informasi oleh kantor-kantor pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat umum, bisnis dan untuk memfasilitasi kerjasama antara institusi pemerintah disebut dengan *e-government*. *E-Government* memiliki posisi penting karena dengannya diharapkan dapat memberdayakan komunitas yang ada lewat akses publik ke sumber informasi yang tersedia. *E-Government* di Indonesia saat ini belum merata, sumber informasi dari pemerintah belum terintegrasi dan bahkan di skala yang lebih kecil masih banyak yang belum mengenal istilah dan apa serta bagaimana *e-Government*.

1.2.2. Permasalahan dan Tantangan Masa Depan Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 yang terkait dengan bidang komunikasi dan informatika perlu mempertimbangkan terjadinya permasalahan yaitu

pergeseran paradigma yang terjadi dalam teknologi informasi dan komunikasi, serta media yang berimbas pada model bisnis dan juga regulasi serta kebijakan yang terkait. Beberapa pergeseran yang perlu dicermati dan dipertimbangkan dalam penyusunan Renstra 2010-2014 Bidang Komunikasi dan informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Lisensi yang bergeser dari lisensi yang berbeda untuk penyelenggaraan telekomunikasi, internet, penyiaran menjadi satu macam lisensi gabungan yang dapat dipergunakan untuk bermacam-macam penyelenggaraan.
- 2) Pemisahan secara vertikal per sektor bergeser menjadi pemisahan secara horisontal antara infrastruktur, layanan, aplikasi dan konten. Demikian juga tentang perlunya pemisahan antara sumber daya dan penyelenggaraan.
- 3) Eksklusivitas sumber daya dan infrastruktur menjadi pemakaian bersama sumber daya dan infrastruktur.
- 4) Tarif layanan yang bebas jarak dan waktu menjadi berbasis volume konten dan kualitas.
- 5) Arah komunikasi dari satu menjadi banyak arah (jaringan) dan semua elemen masyarakat turut berpartisipasi sebagai penyedia dan pengguna informasi.
- 6) Konten yang bebas tanpa campur tangan pemerintah menjadi yang aman dan bertanggung jawab melalui pemberdayaan masyarakat dalam pengawasannya.
- 7) Pasar yang bergeser dari bebas menjadi terlindungi untuk memberi kesempatan pada pemain domestik.
- 8) Hak warganegara atas informasi yang telah dijamin dalam UUD 1945 serta hak atas informasi publik yang telah dijamin dalam UU Keterbukaan Informasi Publik.
- 9) Pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat belum optimal, karena media massa lebih dominan menyajikan konten hiburan, sementara jalur birokrasi untuk penyampaian informasi belum terkoordinasi dengan baik, baik antar lembaga pemerintah pusat maupun antar pemerintah daerah (hubungan pusat dan daerah) dalam informasi.
- 10) Kecenderungan positif terjadi yaitu berkembangnya *citizen journalism*, dimana anggota masyarakat berperan melaporkan peristiwa yang terjadi disekitarnya.
- 11) Dominasi kepentingan bisnis mempengaruhi media massa dan aktifitas komunikasi lainnya, sehingga menjadikan informasi sebagai komoditas material yang akan mendangkalkan rasionalitas, kepekaan, harmonisasi, keserasian yang akhirnya tidak mendukung masyarakat yang aman, damai, sejahtera dan bersatu.

Selain pergeseran paradigma di atas, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kementerian Komunikasi dan Informatika saat ini dan ke depan adalah:

1) Kebijakan dan perundang-undangan

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah pengaturan / regulasi di bidang komunikasi dan informatika masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi. Pengaturan di bidang penyiaran dilakukan berdasarkan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, pengaturan di bidang telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Demikian halnya pengaturan mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008, tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan pengaturan mengenai Informasi Publik dilakukan berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan pengaturan mengenai Pos dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 kemudian sejak tanggal 14 Oktober 2009 telah diberlakukan undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

Untuk mengantisipasi perkembangan bidang komunikasi dan informatika ke depan yang semakin kompleks dan memerlukan penanganan yang lebih arif dalam rangka menampung berbagai kebutuhan dan mengatasi permasalahan yang telah akan dan timbul, diperlukan undang-undang konvergensi yang dapat memfasilitasi dan mensinergikan pengaturan di bidang komunikasi dan informatika .

Berkaitan dengan upaya menciptakan undang-undang yang mengatur mengenai konvergensi tersebut, maka perlu dilakukan pengintegrasian dari undang-undang yang telah ada dan secara substantif pengaturannya masih bersifat parsial. Selanjutnya untuk melengkapi undang-undang kovergensi tersebut dan dalam upaya melindungi masyarakat, dunia usaha dan industri diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai pencegahan sekaligus pemberian sanksi atas pelanggaran di dunia maya melalui rancangan undang-undang tentang *cyber crime* yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan.

Selain permasalahan tersebut di atas, masalah lain yang perlu mendapat perhatian ialah industrialisasi yang belum berpihak kepada industri lokal. Perkembangan industri TIK saat ini masih dikuasai oleh negara-negara yang lebih maju di bidang TIK, karena itu pemerintah perlu menyusun kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan dan peningkatan industri lokal/TIK Nasional sehingga diharapkan TIK Nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan dapat bersaing dengan negara lain yang lebih maju di bidang TIK.

Kebijakan mendorong pertumbuhan dan peningkatan industri lokal/TIK Nasional tersebut perlu disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, baik secara nasional maupun internasional dilakukan dengan berupaya mengakomodasikan dan menyasiasi ketentuan dan regulasi yang berskala internasional, khususnya WTO dan berbagai aturan turunya, agar

kebijakan tersebut tidak ditentang dan produk lokal/TIK Nasional dapat juga dipasarkan di Negara lain.

2) Masalah Birokrasi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Beberapa permasalahan birokrasi saat ini di antaranya adalah belum terbangunnya budaya kerja yang kuat, belum berfungsinya pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan secara maksimal dan masih lemahnya koordinasi antar lembaga terkait masih lemah, sehingga secara keseluruhan kondisi tersebut mempengaruhi capaian kinerja yang kurang optimal. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara menyeluruh, yang antara lain dapat ditempuh melalui reformasi birokrasi yang meliputi restrukturisasi kelembagaan, peningkatan kualitas SDM dan remunerasi.

Dari upaya tersebut diharapkan akan dapat dilakukan penyelenggaraan sistem birokrasi yang bersih, amanah dan profesional yang mampu melakukan pemberdayaan seluruh sumber daya yang tersedia di internal organisasi maupun yang ada di masyarakat termasuk stake holders. Selain itu hal yang diharapkan adalah terciptanya sistem perencanaan yang efektif yang didukung dengan pengawasan secara berkelanjutan.

3) Teknologi

Sebagai sebuah *general purpose technology*, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dapat dipergunakan dalam banyak bidang dan untuk memenuhi banyak macam kebutuhan. Walaupun begitu teknologi informasi sebenarnya memainkan peran fundamental yang sangat sederhana, yaitu:

- a. Menyediakan akses dan mengorganisasikan data, informasi dan pengetahuan dalam jumlah besar dengan kecepatan menakjubkan dan aman. Kemampuan ini dapat mempercepat pembelajaran, inovasi, serta penciptaan dan penyebaran pengetahuan kepada seluruh elemen masyarakat.
- b. Mempercepat dan mereduksi biaya transaksi dan produksi seluruh kegiatan perekonomian. Dengan memasukkan komponen teknologi informasi ke dalam hampir semua peralatan produksi, transportasi, perbankan, asuransi memungkinkan untuk melakukan pencatatan dan pengendalian secara *real time*, mempercepat pelaksanaan transaksi, pembuatan dan penyesuaian rencana serta perbandingannya dengan realisasi. Dengan demikian permasalahan akan cepat dideteksi, diidentifikasi, dan diselesaikan. Pada akhirnya efisiensi dan produktivitas akan meningkat.
- c. Membentuk hubungan langsung antar manusia, komunitas, perusahaan, pemerintah, dan organisasi pada umumnya. Dengan terbentuknya hubungan ini akan terlaksana kegiatan kolaborasi, partisipasi, koordinasi, bahkan pemberdayaan dan desentralisasi. Selain itu juga dapat berperan dalam pembelajaran bisnis dan sosial, serta terjadinya sinergi yang

memungkinkan terjadinya pertukaran dan percepatan pengetahuan. Dengan demikian masing-masing pihak yang terhubung tersebut akan memperoleh manfaatnya.

Peran fundamental teknologi informasi di atas menyebabkan teknologi informasi memiliki potensi pemanfaatan yang dibagi menjadi beberapa tingkatan sebagai berikut:

- a. Keterhubungan antar dua titik atau lebih yang terbentuk dari pemanfaatan teknologi informasi. Keterhubungan ini untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat harus memenuhi syarat-syarat: infrastruktur, layanan, dan informasinya tersedia di lokasi yang membutuhkan, tarifnya terjangkau bagi yang membutuhkan, kualitas jaringan dan layanannya memenuhi syarat, dan keamanan layanannya terjamin.
- b. Transaksi ekonomi yang dapat dilakukan menggunakan keterhubungan yang telah terbentuk tersebut sehingga memunculkan inovasi-inovasi bisnis baru yang dapat menggerakkan roda perekonomian menjadi berputar lebih cepat
- c. Kolaborasi yang terjadi antar pengguna yang terhubung dalam suatu jaringan yang terbentuk dari keterhubungan yang ada sehingga menghasilkan sinergi yang kuat antar mereka.
- d. Transformasi sosial dan ekonomi yang terlaksana karena terjadinya perubahan yang mendasar dalam bagaimana kegiatan-kegiatan bisnis dan sosial dilaksanakan.

Teknologi informasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih produktif, inovatif, kolaboratif sehingga memiliki daya saing global yang lebih kuat. Dalam mencapai peran yang diharapkan di atas, teknologi informasi diperlukan untuk dapat memberikan nilai tambah pada tiap tahap dari rantai pasokan informasi, yang terdiri dari komponen-komponen teknologi informasi sebagai berikut:

- a. Sumberdaya alam dan teknologi. Penggunaan sumberdaya alam seperti frekuensi dan orbit satelit yang sangat terbatas serta sumberdaya teknologi seperti nomor dan alamat, harus dikelola dengan baik sehingga diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pemangku kepentingan
- b. Infrastruktur dan jasa. Sumberdaya tersebut baru dapat dimanfaatkan setelah digelarnya infrastruktur jaringan pada sisi penyedia lengkap dengan peralatan akses pada sisi pengguna, beserta sistem aplikasi yang diperlukan untuk mendukung operasional penyelenggaraan jaringan dan jasa-jasa nilai tambah yang diciptakan sebagai pelengkap dari jaringan yang telah terbentuk.

- c. Kandungan atau konten. Informasi yang dibangkitkan, dikumpulkan, disediakan, disebarkan, disalurkan secara waktu nyata (*real-time*) dan *linier* ataupun tunda baru dapat diselenggarakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan jaringan dan jasa yang telah tersedia.

Mengingat pentingnya peranan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana tersebut di atas, maka infrastruktur komunikasi dan informatika sebagai infrastruktur dasar bagi masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangan bangsanya, mutlak harus dibangun dan disediakan oleh negara dengan melibatkan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya karena di masa depan, informasi tidak lagi menjadi domain negara, tetapi juga merupakan domain publik yang dapat dibuat dan diakses oleh setiap anggota masyarakat. Keterlibatan sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi disparitas ketersediaan infrastruktur antara perkotaan dan perdesaan, serta antara wilayah barat dan timur Indonesia yang masih besar.

Upaya-upaya konkrit ke depan yang harus dilakukan untuk memberikan arah pengembangan teknologi informasi dan komunikasi secara komprehensif adalah perlunya disusun roadmap teknologi informasi dan komunikasi yang dibarengi dengan revitalisasi badan penelitian dan pengembangan. Selain itu untuk menciptakan teknologi informasi dan komunikasi yang terjangkau dan ramah lingkungan, gerakan teknologi tepat guna spesifik lokasi dan daerah perlu terus didorong, agar kemampuan dalam memanfaatkan perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, dapat sesuai dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.

4) Informasi dan edukasi/*i-literacy*

Belum optimalnya upaya pelayanan informasi publik untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat terhadap informasi publik mengakibatkan adanya kesenjangan kemampuan akses masyarakat terhadap informasi, sehingga menimbulkan permasalahan dalam hal keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan potensi masyarakat secara individual.

Adanya ketidakjelasan pembatasan informasi publik dan yang bukan informasi publik, menimbulkan permasalahan mengenai hak masyarakat atas informasi pemerintah dan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat serta perlindungan rahasia negara, yang antara lain juga disebabkan oleh belum disadarinya sekuritas informasi oleh institusi/lembaga penyedia informasi.

Kondisi umum sarana komunikasi nasional dewasa ini masih memerlukan penataan dan pengaturan kembali sesuai perubahan paradigma komunikasi dan informatika serta perubahan sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Demikian juga kondisi pelaksanaan diseminasi informasi

pemerintah masih lemah karena belum mantapnya koordinasi dan sinergi pelaksanaan diseminasi informasi penyelenggaraan negara, pemerintahan dan kemasyarakatan, antar pemerintah, dan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Lembaga penyiaran yang merupakan sarana komunikasi dan diseminasi informasi, dalam era reformasi dewasa ini berada pada iklim kompetisi yang lebih dominan berorientasi pada pasar sehingga dapat menimbulkan pengaruh negatif dalam pembangunan bangsa yang disebabkan oleh isi siaran/pemberitaan yang tidak seimbang dan cenderung merugikan pemerintah. Sementara itu terpaan media penyiaran asing juga sulit dihindarkan di mana peliputannya tentang Indonesia dewasa ini masih lebih banyak melaporkan aspek negatif, sehingga menimbulkan citra buruk Indonesia di dunia internasional.

Sebagai upaya untuk mengurangi kondisi negatif dari dunia penyiaran tersebut, ke depan perlu ditingkatkan kapasitas tugas dan fungsi dari KPI Pusat dan KPI daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksana tugas pengawasan terhadap isi/konten siaran yang dipublikasikan dan disiarkan oleh pelaku industri penyiaran.

Paralel dengan peranan komunikasi dan informatika dalam mengatasi berbagai permasalahan nyata dewasa ini, dengan memperhatikan arah perkembangan peradaban pada masa yang akan datang, maka implementasi dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah menjadi kebutuhan dan bahkan dalam aspek tertentu menjadi katalisator seperti penerapan *e-Government* dan *e-Procurement* yang menjadi metode dalam upaya mengatasi sebagian isu KKN. Artinya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadi prioritas untuk menyiapkan Indonesia menghadapi masa depan dan sekaligus menjadi bagian dari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan dewasa ini.

Pendistribusian informasi dapat dilakukan melalui ruang publik yang tersedia dan ruang privat tiap individu dengan mempertimbangkan hak-hak tiap warganegara atas informasi dengan menggunakan media-media komunikasi yang sesuai. Dalam pendistribusian informasi tersebut, pemerintah bertindak sebagai eksekutor maupun regulator.

Sebagai eksekutor, pemerintah menyediakan ruang dan saluran yang diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada seluruh elemen masyarakat. Sebagai regulator pemerintah juga dapat mengharuskan pihak swasta dalam berperan melaksanakan komunikasi publik yang sesuai dengan tujuan mencerdaskan bangsa. Untuk terpenuhinya hal tersebut diperlukan cara-cara komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi publik yang efektif dan efisien dalam pemanfaatan ruang dan media yang ada.

Di sisi lain, pada level semantik dan perilaku, kombinasi dengan media tradisional sangat penting dalam usaha menyampaikan pesan-pesan yang terkandung dalam informasi publik dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat sesuai dengan sosio-kulturalnya. Dalam usaha penciptaan sistem komunikasi yang efisien dan efektif tersebut, juga diperlukan pemilahan informasi yang harus disebar (*push*) ke masyarakat dan mana yang harus diunduh (*pull*) oleh masyarakat. Demikian juga, mana yang harus yang bersifat umum sehingga harus ditangani oleh badan komunikasi pemerintah dan mana yang bersifat khusus yang harus ditangani oleh tiap sektor.

Proses komunikasi publik yang berlangsung efektif dan efisien sebagaimana tersebut di atas, akan mampu menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemberian bentuk layanan publik cepat, akurat dan terjangkau sesuai kebutuhan dan kemampuan masyarakat. Sebaliknya apabila proses komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah melalui layanan publik kurang efektif yang kurang efektif akan menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap kinerja pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

5) Pasar, Pelaku Usaha dan Masalah Software Ilegal/Bajakan

Perkembangan industri komunikasi dan informatika telah mendorong lahirnya usaha-usaha penunjang yang memberikan peluang bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk menjadi mitra kerjasama bagi industri di bidang komunikasi dan informatika yang telah mapan. Usaha baru yang hadir dalam industri di bidang komunikasi dan informatika yang bersifat penunjang tersebut, perlu diberikan kesempatan yang seluas-luasnya agar dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan industri ini. Hal ini dapat meningkatkan kandungan lokal industri telekomunikasi sehingga ketergantungan terhadap piranti lunak dan perangkat telekomunikasi impor dapat dikurangi.

Penentuan standar teknik di bidang komunikasi dan informatika nasional juga merupakan bagian integral dari pengembangan persaingan yang efisien di bidang komunikasi dan informatika. Di samping itu, upaya standarisasi juga dimaksudkan untuk melindungi para pengguna telekomunikasi dari aspek kualitas penyelenggaraan telekomunikasi.

Sedangkan perijinan penyelenggaraan di bidang komunikasi dan informatika dimaksudkan untuk mengatur dalam artian menata, menjaga dan membuka pasar, menjamin efisiensi investasi, menjamin kepentingan pengguna/pelanggan jasa di bidang komunikasi dan informatika. Hingga saat ini proses perijinan masih dirasakan lambat, dan belum seluruhnya mengacu kepada standar internasional.

Sebagai upaya untuk memperkuat pelaku usaha di bidang komunikasi dan informatika, maka perlu dilakukan upaya penguatan pelaku usaha, khususnya usaha kecil menengah dan berada di daerah-daerah. Selain itu terkait perlu dilakukan konsolidasi strategi di level industri dengan lapangan industri bidang komunikasi dan informatika.

Perkembangan TIK terjadi sangat pesat dan cepat berubah sehingga membuat suatu perangkat teknologi informasi dan komunikasi menjadi cepat usang. Di Indonesia kemampuan untuk memproduksi perangkat TIK relatif sangat rendah sehingga mengakibatkan sifat ketergantungan dalam memanfaatkan perangkat teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut memosisikan Indonesia sebagai Negara yang banyak mengimpor perangkat/produk industri di bidang TIK dimana ditinjau dari segi harga relatif menjadi lebih mahal. Kondisi sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kecenderungan terjadinya penggunaan perangkat TIK (*software*) bajakan yang cukup besar dan berdampak pada sistem industri dan perekonomian dalam negeri. Terjadinya pembajakan software yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab tersebut menunjukkan bahwa masih lemahnya fungsi pengawasan terhadap aktivitas pemasaran perangkat TIK produk bajakan. Untuk mengatasi permasalahan di atas perlu ditetapkan kebijakan mengenai:

- a. Pengembangan dan insentif/subsidi software lokal yang produktif. Dalam rangka memperkuat sistem teknologi informasi nasional dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi global, pemerintah mendukung pengembangan dan pemanfaatan *Open Source Software* (OSS). Penggunaan OSS dapat menurunkan biaya pembelian perangkat lunak (khususnya penggunaan sistem operasi desktop dan jaringan) sehingga dapat menghemat devisa dalam pengadaan perangkat lunak; menumbuhkan industri perangkat lunak dalam negeri sehingga dapat meningkatkan inovasi bidang teknologi informasi dan kompetisi bidang teknologi informasi; memberi peluang untuk pengembangan perangkat lunak dalam permasalahan lokal spesifik; mengurangi permasalahan HaKI; mengurangi ketergantungan terhadap satu vendor tertentu; meningkatkan akses informasi masyarakat sehingga memperkecil kesenjangan teknologi informasi; meningkatkan kreativitas dalam mengembangkan dan memanfaatkan informasi teknologi (kreativitas tidak dibatasi oleh software yang ada); mendorong untuk meningkatkan kreativitas dalam memberikan solusi kebutuhan sendiri; mengembangkan kemampuan sumber daya manusia bidang teknologi informasi; perubahan paradigma dari "*IT import*" ke "*IT export*" tinggi; *pemroduksi solusi TI dengan kemandirian tinggi*.

Dalam rangka terciptanya bidang konten yang baik dan terarah, serta meningkatkan daya saing konten lokal dan bagi tumbuh kembangnya industri konten lokal, pemerintah harus membuat kebijakan atau *guidance*

tentang konten nasional (*communication and multimedia content code*). Kebijakan tersebut harus mampu mendorong pelaku usaha konten untuk lebih kreatif dan inovatif dalam emnciptakan produk local konten yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

- b. Pengawasan pelaksanaan UU Hak Cipta dan promosi IGOS sebagai ikon untuk memicu produktivitas industri local. Dalam menghadapi masalah *piracy* dalam bidang *software*, Indonesia telah mendeklarasikan program *Indonesia Go Open Source* (IGOS) yang dilakukan oleh 5 (lima) instansi yaitu Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kehakiman dan HAM. Program ini merupakan bagian dari kegiatan pengawasan dalam pelaksanaan UU Hak Cipta dalam rangka menekan munculnya *software illegal* dan bajakan sekaligus sebagai upaya untuk mendorong peningkatan dan pengembangan industri software lokal dalam menghadapi persaingan global, meningkatkan kreativitas anak bangsa dan penegakan hak atas kekayaan intelektual. Dalam rangka menurunkan angka pembajakan perangkat lunak, pemerintah juga menyelenggarakan Kampanye *Software legal*.

BAB II

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Rumusan Visi

Rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika merupakan Visi Institusi yang digunakan sebagai arahan kepada setiap jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugasnya. Rumusan Visi Institusi ini disusun dalam rangka mendukung tercapainya Visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

Untuk mewujudkan visi Negara Indonesia dimaksud, merupakan kewajiban seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa lainnya. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera dan berdaya saing tinggi.

Institusi yang berperan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat informasi yang sejahtera, berbudaya dan berbasis pengetahuan, tidak hanya Kementerian Komunikasi dan Informatika, tetapi juga pihak lain, baik sebagai lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Dalam konteks ini Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki kompetensi sebagai perumus kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis serta pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, serta dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2010-2014, maka Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika yaitu sebagai berikut :

“Terwujudnya Indonesia Informatif menuju masyarakat sejahtera melalui pembangunan kominfo berkelanjutan, yang merakyat dan ramah lingkungan, dalam kerangka NKRI”

Makna yang terkandung dalam rumusan Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut di atas yaitu:

- 1) *Terwujudnya Indonesia Informatif*, adalah suatu karakteristik bangsa yang bercirikan antara lain sudah menyadari, memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengakses dan memanfaatkan serta menyebarkan informasi, dan menjadikan informasi sebagai nilai tambah dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

- 2) *Masyarakat sejahtera*, adalah keadaan sentosa dan makmur, selamat, mampu menghadapi segala macam gangguan. Sentosa mengandung arti berada dalam keadaan aman dan tenteram, sedangkan makmur dapat diartikan sebagai keadaan serba berkecukupan atau tidak berkekurangan. Jadi sejahtera tidak hanya memiliki dimensi fisik atau materi tetapi juga dimensi rohani.
- 3) *Pembangunan kominfo berkelanjutan*, adalah pembangunan komunikasi dan informatika yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan untuk menciptakan keseimbangan kebutuhan masyarakat pengguna.
- 4) *Pembangunan kominfo yang merakyat* adalah ketepatan sasaran pembangunan kominfo kepada masyarakat pengguna dan keterjangkauan masyarakat untuk mendapatkan, memanfaatkan, mengolah dan mengakses informasi sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus mewujudkan daya saing bangsa.
- 5) *Pembangunan kominfo yang ramah lingkungan* adalah penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara terintegrasi yang didukung oleh konvergensi teknologi informasi dan komunikasi yang ramah lingkungan.
- 6) *NKRI*, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang menjadi cita-cita bersama dan harus diupayakan dengan sungguh-sungguh.

2.2. Rumusan Misi (M1 s/d M5)

- 1) Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar dan informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI;
- 2) Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi ;
- 3) Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa ;
- 4) Mengembangkan sistem kominfo yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan ;
- 5) Memperjuangkan kepentingan nasional kominfo dalam sistem pasar global.

2.3. Tujuan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pambinaanbidakomunikasi dainformatika, maka tujuan yang akan di capai dalam kurun waktu 2010-2014, sebagai berikut :

2.3.1. Bidang Infrastruktur Informasi dan Komunikasi

- 1) Tersedianya akses komunikasi dan informatika yang merata di seluruh Indonesia (mengecilnya kesenjangan digital) dengan indikator dampak dan

target pencapaian pada tahun 2014: jumlah provinsi yang memiliki indeks kesiapan kompetisi (*competition readiness index*) baik, yaitu sekurang-kurangnya 49 persen dari total jumlah provinsi di seluruh Indonesia mempunyai indeks tinggi dan sekurang-kurangnya 51 persen dengan indeks menengah.

- 2) Tersedianya sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah *blank spot* dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) jangkauan layanan pos universal mencapai 100 persen di wilayah PSO; (b) jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan internet mencapai 100 persen di Wilayah Pelayanan Umum Telekomunikasi (USO); serta (c) jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing mencapai 88 persen dan 90 persen.
- 3) Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 50 persen; (b) tingkat penetrasi pengguna layanan *broadband* sekurang-kurangnya 30 persen; (c) tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi 35 persen; (d) jaringan *backbone* telekomunikasi yang menghubungkan antarpulau besar mencapai 100 persen; serta (e) jumlah ibukota kabupaten/kota yang terhubung/terintegrasi ke dalam jaringan *backbone* serat optik nasional Palapa Ring mencapai sekurang-kurangnya 60 persen dari total ibukota kabupaten/kota, termasuk ibukota kab/kota di wilayah timur Indonesia yang harus selesai sebelum tahun 2013.
- 4) Tersedianya layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial dengan indikator dan dampak target capaian tahun 2014 : (a) desa yang dilayani akses internet mencapai 80 %; (b) Ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara *broadband* mencapai 75%; (c) Ibukota provinsi yang memiliki *national internet exchange* mencapai 100% dengan catatan pelaksanaannya memenuhi kelayakan operasional;(d) Ibu kota provinsi yang memiliki *international internet exchange* mencapai mencapai 100% yang terdiri dari 4 Ibukota provinsi, untuk ibukota propvinsi yang lain, akan dibangun sesuai dengan kelayakan operasional;
- 5) Kebijakan, regulasi, rencana pemanfaatan dan rekayasa sumber daya spektrum frekuensi radio, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) penetapan pita frekuensi radio dan pemanfaatan *slot orbit* satelit mencapai 95%; (b) ketersediaan spektrum frekuensi radio untuk

mendukung siaran TV Digital mencapai 50% wilayah jangkauan yang meliputi populasi. Terkait dengan ini akan digunakan *band* frekuensi yang layak secara teknis dan ekonomis (bukan di frekuensi 108 MHz yang diperuntukkan untuk penerbangan), sedangkan target disesuaikan dengan program digitalisasi;

- 6) Kebijakan, regulasi, rencana optimalisasi sumber daya spektrum dan non spektrum, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 : (a) tingkat utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio mencapai 70% (target capaian 100% sangat terpengaruh oleh pemanfaatan Spektrum Radio yang sangat tergantung pada nilai ekonomis dari suatu wilayah dan ketertarikan investor); (b) pengelolaan sumber daya pos, penomoran telekomunikasi dan alamat IP mencapai 100%; (c) pengembangan sarana dan prasarana perizinan mencapai 100%; (d) pelayanan spektrum frekuensi yang diproses tepat waktu mencapai 95 % (target 100% dapat tercapai apabila tidak terkendala oleh tingkat kehandalan perangkat/mesin).
- 7) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pos, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) verifikasi terhadap pelaksanaan PSO Pos mencapai 100%; (b) pencapaian terhadap kuantitas dan kualitas layanan pos diharapkan akan mencapai 90% (target 100% dapat tercapai jika tidak terkendala oleh faktor eksternal : iklim/cuaca dan transportasi);
- 8) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) penetapan regulasi teknis infrastruktur menuju era konvergensi mencapai 100 %, dengan jumlah paket disesuaikan dengan kebutuhan; (b) kualitas penyelenggaraan telekomunikasi dan pemanfaatan aplikasi teknologi telekomunikasi, informasi dan komunikasi mencapai 90% (pada praktek untuk mencapai target 100% sulit, namun demikian telah disiapkan instrumen denda bagi penyelenggara yang tidak patuh); (c) kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri telekomunikasi diharapkan akan mencapai 100%; (d) penyusunan dan pembahasan *ICT Fund* dan optimalisasi pemanfaatan PNBPN, akan selesai 100%;
- 9) Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas penyelenggaraan penyiaran, dengan indikator dan target capaian tahun 2014 antara lain : (a) pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri mencapai 100%; (b) ketepatan penyelesaian layanan perijinan mencapai 90% (target 100%

- dapat tercapai apabila didukung oleh mekanisme perijinan yang melibatkan beberapa instansi, dapat berjalan dengan baik); (c) penyusunan *Grand Strategy* dan *Road Map* Penyelenggaraan Penyiaran, mencapai 100%;
- 10) Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi sertifikasi sistem elektronik, jasa aplikasi dan konten, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) penyelenggara layanan sistem elektronik telah dapat disertifikasi 80% (target 100% terkendala oleh pesatnya perkembangan teknologi dan layanan elektronik); (b) sistem informasi pekerja migran akan mencapai 24 paket beserta operasional dan pemeliharaan;
 - 11) Kebijakan, regulasi, standar, sertifikasi, interoperabilitas perangkat pos, telekomunikasi dan penyiaran, dengan indikator dan capaian tahun 2014 antara lain : peningkatan interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten mencapai 90% (tingkat kesulitan untuk mencapai target 100% cukup tinggi, karena berkembangnya keberagaman perangkat yang digunakan);
 - 12) Tercapainya tingkat e-literasi masyarakat Indonesia menjadi 50 persen pada tahun 2014.
 - 13) Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara *online* dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) nilai rata-rata *e-government* instansi pemerintah sekurang-kurangnya menjadi baik (3,4 dari keseluruhan dimensi yang dinilai, yaitu kebijakan, kelembagaan, sarana dan prasarana, aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian yang dilakukan secara berkala); (b) jumlah aparatur pemerintah yang paham TIK sekurang-kurangnya menjadi 80 persen dari total aparatur pemerintah; (c) prosentase jumlah e-provinsi yang merupakan muara sistem elektronik kabupaten/kota di masing-masing provinsi mencapai 100 persen; serta (d) tersedianya layanan publik yang dapat diakses secara *online* sekurang-kurangnya untuk layanan kependudukan (*e-citizen*), perizinan (*e-licensing*), dan pengadaan (*e-procurement*).
 - 14) Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK dengan indikator dampak dan target pencapaian pada tahun 2014: (a) prosentase alat dan perangkat telekomunikasi yang memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mencapai 30 persen; (b) prosentase jumlah penyelenggara telekomunikasi yang memenuhi ketentuan TKDN untuk belanja modal dan belanja operasional mencapai 40 persen; dan (c) prosentase TKDN *set top box* TV digital sekurang-kurangnya mencapai 30 persen.

2.3.2. Bidang Komunikasi dan Informasi

- 1) Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang bersifat mendidik, mencerahkan masyarakat dalam kerangka NKRI , dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) penguatan media center di provinsi/kabupaten kota untuk 15 media center; (b) aktivitas penyebaran informasi publik langsung kepada masyarakat mencapai 80 %;
- 2) Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kemitraan dalam penyebaran informasi publik, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) peningkatan peran organisasi kemasyarakatan sebagai penyebar informasi (Kelompok Informasi Masyarakat-KIM, media tradisional, dan media komunitas) di wilayah perbatasan yang dilaksanakan tepat waktu mencapai 80%; (b) fasilitasi penyebaran informasi publik melalui media kemasyarakatan yang tepat waktu dan akuntabel mencapai 90%;
- 3) Penyediaan dan peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi sebagai agen penyedia, pengelola dan penyebar informasi publik, dengan indikator dan capaian target tahun 2014 antara lain : (a) pelaksanaan bimbingan teknik CIO untuk 2500 orang peserta; (b) pelaksanaan bimbingan teknis Budaya Dokumentasi dalam rangka mendukung pelaksanaan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mencapai 2500 orang; (c) pelaksanaan program pemberian bea siswa bidang komunikasi dan informasi untuk 1398 mahasiswa; (d) peningkatan standar kompetensi kerja bidang komunikasi dan informasi sejumlah 40 paket; dan (e) sertifikasi SDM komunikasi dan informasi mencapai 4980 orang.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang mendukung visi dan misi yang ingin dicapai ialah sebagai berikut :

Tabel 3 :
Sasaran Strategis

M1	Meningkatkan kecukupan informasi masyarakat dengan karakteristik komunikasi lancar informasi benar menuju terbentuknya Indonesia informatif dalam kerangka NKRI	
	S1.1	Meratanya pembangunan sarana dan prasarana pos, komunikasi dan informatika di seluruh Indonesia
	S1.2	Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien
	S1.3	Tersedia dan tersebarnya informasi yang faktual dan berimbang ke seluruh pelosok dan lapisan masyarakat Indonesia dalam kerangka NKRI
M2	Mewujudkan birokrasi layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi	
	S2.1	Terselenggaranya pengelolaan sumber daya komunikasi dan informatika yang optimal

	S2.2	Terselenggaranya layanan pos, komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi
	S2.3	Tersedianya standar alat dan standar mutu layanan serta mekanisme pengawasan yang akuntabel pada layanan pos, komunikasi dan informatika
M3	Mendorong peningkatan tayangan dan informasi edukatif untuk mendukung pembangunan karakter bangsa	
	S3.1	Tersedianya layanan konten informasi yang edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat
	S3.2	Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan konten informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat
	S3.3	Tercapainya peran-serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan memberdayakan masyarakat
	S3.4	Terwujudnya masyarakat informasi yang kritis, produktif, beradab, berdaya saing dan cinta tanah air
M4	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan	
	S4.1	Mendorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang komunikasi dan informatika
	S4.2	Mendorong penciptaan sumber daya manusia unggul di bidang komunikasi dan informatika
	S4.3	Mendorong berkembangnya industri komunikasi dan informatika yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan
	S4.4	Mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang mendorong tumbuh-kembangnya kreatifitas dan inovasi berdasarkan kearifan lokal
M5	Memperjuangkan kepentingan nasional komunikasi dan informatika dalam sistem pasar global	
	S5.1	Mendorong penguatan kapasitas produksi industri komunikasi dan informatika nasional agar mampu bersaing di dunia internasional
	S5.2	Mendorong rasa cinta tanah air melalui penggunaan produk dalam negeri bidang komunikasi dan informatika
	S5.3	Meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam perjanjian internasional di bidang komunikasi dan informatika
	S5.4	Membangun pencitraan positif negara Indonesia di mata Internasional

2.5. Program Prioritas

Sasaran pembangunan pada akhir periode 2010-2014 yang telah dirumuskan akan dicapai melalui program-program pembangunan sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika.

Dengan memperhatikan sasaran dan arah kebijakan, program pembangunan pertama diarahkan pada penyusunan kebijakan dan regulasi demi terciptanya penggunaan dan pemanfaatan sumber daya komunikasi dan informatika yang dalam hal ini populer disebut telematika (telekomunikasi, media, dan informatika) yang seoptimal mungkin. Menciptakan kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan penyiaran Pembangunan sarana dan prasarana telematika yang berbasis pada efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, dilaksanakan melalui penguatan semua sarana

prasarana yang diperlukan pada tahapan produksi komunikasi dan informatika, sektor yang terkait langsung dengan bidang komunikasi dan informatika seperti sektor pos, sektor telekomunikasi, sektor penyiaran, sektor aplikasi dan sektor informasi publik dengan memperhatikan kecenderungan konvergensi antar sektor tersebut. Dengan kebijakan dan regulasi yang tepat dan sesuai, diharapkan akan terjadi pemakaian bersama (*sharing*) sumber daya, sarana dan prasarana komunikasi dan informatika secara nasional, dengan sasaran pemanfaatan seoptimal mungkin untuk kepentingan bangsa dan negara. Selanjutnya peningkatan standarisasi dan sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi akan dilaksanakan secara aktif dalam menjaga terlaksananya kewajiban interkoneksi dan interoperabilitas secara berkesinambungan. Melalui efisiensi nasional ini, diharapkan industri akan mampu memberikan keterjangkauan harga bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa intervensi langsung pemerintah, dan tetap memberikan daya tarik yang baik bagi investor di bidang komunikasi dan informatika.

Kebijakan dan regulasi yang dibuat selain dirancang untuk menjaga keterjangkauan harga juga dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keamanan layanan, serta mendorong terjadinya faktor persaingan yang sehat antar penyelenggara. Kebijakan dan regulasi tentang standar kualitas layanan dan standar keamanan layanan disusun oleh pemerintah dan terus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Pengawasan kesesuaian operasional terhadap standar terus dipantau yang disertai dengan aturan sanksi yang memadai bagi pelanggaran yang terjadi dalam usaha melindungi masyarakat.

2) Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Telekomunikasi dan Penyiaran), diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta mampu memiliki daya saing di tingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi antar operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia seperti telepon, siaran televisi, *siaran radio*, *surat kabar/majalah*, *media tradisional*, pos, internet, dan media komunikasi dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin penyelenggaraannya. Di samping itu juga diciptakan peluang usaha yang menarik minat investor untuk membangun infrastruktur dan menyediakan kebutuhan premium seperti layanan pita lebar untuk aplikasi dan konten yang lebih canggih juga dibangun secara merata di daerah perkotaan sampai ke kota-kota kecil sehingga program Indonesia internet sehat dan bermanfaat dapat tercapai. Persaingan usaha diciptakan sedemikian rupa sehingga interkoneksi jaringan dan interoperabilitas layanan tetap terlaksana dalam usaha mencapai efisiensi nasional.

Melalui program ini pemerintah secara aktif mendorong pembangunan dan pemerataan komunikasi dan informatika, baik melalui penguatan infrastruktur, layanan, dan kandungan informasi untuk dapat menjangkau seluruh pelosok Nusantara, sehingga dapat dipergunakan segenap penduduk Indonesia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Program ini juga diarahkan pada penguatan kapabilitas masyarakat melalui serangkaian program peningkatan penelitian pengembangan TIK berbasis lokal, program peningkatan pembangunan SDM TIK Indonesia untuk meningkatkan apresiasi dan partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan informasi ini, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program pembangunan pemberdayaan masyarakat di bidang komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk peningkatan *e-literacy masyarakat (50% penduduk)*, pembentukan komunitas informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab, serta program pembangunan desa informatif (*Information Villages*) dengan pemanfaatan media cetak dan elektronik *serta media tradisional terutama di daerah-daerah pedesaan* sebagai bagian dari ruang publik untuk penyebaran informasi.

Tersusunnya *Grand Design* sistem penyiaran Indonesia dan road map sistem penyiaran Indonesia, serta pembangaunan stasiun TVRI dan RRI untuk pemerataan penyiaran; memfasilitasi jangkauan lembaga penyiaran di daerah perbatasan, terpencil dan blank spot; peenyediaan database lembaga penyiaran yang terintegrasi dengan unit terkait (KPI, Pemda/ infokom, Kementerian Kominfo)

3) Program Pengembangan Aplikasi Informatika

Dalam mengupayakan semua sumber daya komunikasi dan informatika dapat berfungsi dan digunakan dilaksanakan dengan baik, diperlukan dukungan kapabilitas nasional baik SDM maupun industri melalui serangkaian program penguatan sumber daya manusia dan penguatan rantai pasok industri penunjang. Perwujudan kapabilitas nasional ini diarahkan pada penciptaan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi tenaga ahli dan tenaga trampil untuk mengisi lapangan kerja di bidang komunikasi dan informatika , serta membina masyarakat agar mampu berperan aktif dalam lalu lintas komunikasi dan informatika baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun secara aktif berperan serta dalam percaturan kehidupan antar bangsa.

Terkait dengan hal tersebut, dalam pengembangan aplikasi telematika yang dapat menciptakan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, maka hal yang harus dikembangkan ialah pembangunan sistem layanan pemerintahan (*e-Government*) yang terintegrasi dan memiliki interoperabilitas yang mampu menciptakan sistem *e-Government* nasional, sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam perwujudan kapabilitas nasional juga harus diupayakan melalui upaya peningkatan sistem keamanan komunikasi dan informatika nasional yang akan sangat berpengaruh terhadap keamanan data dan jaringan, serta berkemampuan keamanan yang mampu membentuk jati diri bangsa yang berbudaya dan bermoral, sehingga dapat membangun harga diri bangsa dalam pergaulan masyarakat internasional. Hal tersebut juga akan mampu menjadi pendorong utama dalam memajukan daya saing bangsa melalui pengembangan sektor industri komunikasi dan informatika nasional yang bertaraf internasional.

Program peningkatan pengembangan TIK berbasis lokal termasuk industri konten, adalah program yang dimaksudkan untuk menciptakan kapabilitas nasional yang ditunjukkan oleh tumbuh dan berkembangnya industri penunjang bidang komunikasi dan informatika yang ditopang oleh kemampuan menghasilkan dan menggunakan produk dalam negeri yang berdasar atas potensi sumber daya alam, sumber daya kultural dan capaian ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan anak bangsa. Program tersebut diwujudkan melalui penciptaan produk-produk, baik berupa perangkat, jasa, ataupun konten yang berkualitas dengan didukung oleh iklim industri yang sehat dengan kemampuan promosi serta pemasaran yang tepat.

4) Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Pembentukan masyarakat informatif melalui penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi, dilaksanakan oleh pemerintah yang secara aktif mengumpulkan informasi bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat; menyebarkan informasi bermanfaat secara merata kepada seluruh elemen masyarakat. Pembentukan program pembentukan masyarakat informasi, dari sisi pasokan dilaksanakan melalui program penyebaran informasi publik yang bermanfaat bagi pengembangan kapabilitas masyarakat dan program peningkatan implementasi *e-government* sampai tingkat daerah.

Sedang dari sisi kebutuhan, pembentukan masyarakat informasi dilaksanakan melalui program pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memperoleh manfaat yang maksimal dari informasi yang dikomunikasikan, termasuk penguasaan teknologi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dalam kaitannya dengan sektor yang lain seperti: sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; sektor kesehatan dan lingkungan hidup; sektor pendidikan; sektor pertahanan dan kemananan; sektor industri, perdagangan dan tenaga kerja dll, maka bidang komunikasi dan informatika diarahkan pada penguatan kapasitas layanan informasi publik yang berkualitas dan penggunaan sumber daya yang seefisien *mungkin melalui sinergi program dan integrasi proses* komunikasi dan informatika.

Pada akhirnya, ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat merupakan sebagai salah satu ciri khas masyarakat informasi yang sejahtera dan memiliki daya saing. Kondisi

tersebut sejalan dengan dilaksanakannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai efektif mulai berlaku pada Mei 2010. Dalam program pengembangan informasi publik, selain sebagai eksekutor, pemerintah juga berfungsi sebagai regulator yang memungkinkan bagi pemerintah untuk dapat memperoleh ruang publik yang memadai dalam penyebaran informasi, dana yang cukup untuk menjalankan fungsi penyebaran, pembelajaran, pemberdayaan dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah melalui regulasi yang dibuatnya diperlukan untuk menjaga ruang privat masyarakat tidak dipergunakan untuk lalu lintas informasi yang tidak dikehendakinya.

5). Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo

Dalam rangka mengembangkan sistem komunikasi dan informatika yang berbasis kemampuan lokal yang berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan diperlukan dukungan penelitian dan pengembangan dan pengembangan SDM Kominfo. Penelitian dan pengembangan meliputi aspek-aspek regulasi, teknologi dan pasar. Untuk itu perlu didorong tumbuhnya iklim penelitian dan pengembangan di bidang Kominfo. Di bidang pengembangan SDM Kominfo diarahkan untuk penciptaan SDM unggul melalui serangkaian kegiatan pengembangan SDM Kominfo.

Untuk mencapai hal tersebut di atas, dalam rangka mencapai tujuan ketujuh yaitu tercapainya sertifikasi 4980 tenaga kerja TIK berbasis standar kompetensi kerja (lihat halaman 26), harus dikembangkan standar kompetensi kerja secara nasional, regional, internasional maupun berbasis vendor beserta kurikulumnya, selanjutnya perlu dikembangkan pusat pelatihan TIK serta fasilitasi sertifikasi TIK SDM TIK. Juga perlu dilakukan usaha-usaha yang menjembatani (*bridging*) lulusan perguruan tinggi TIK agar dapat bekerja di industri TIK. Selanjutnya perlu dikembangkan kerjasama regional yang memungkinkan tenaga kerja TIK nasional bisa bekerja lintas regional yang memungkinkan tenaga kerja TIK nasional bisa bekerja lintas negara sesuai dengan kompetensi TIK yang *mutual recognition*.

2.6. Indikator Kinerja

Untuk mengukur seberapa baik kinerja masing-masing satuan kerja dan Kementerian secara keseluruhan dalam melaksanakan rencana kerja strategis, masing-masing kegiatan telah dibuatkan indikator kinerja output maupun indikator kinerja outcome. Indikator kinerja output dan indikator kinerja outcome beserta target pencapaian masing-masing digabungkan dengan rencana kegiatan yang telah disusun, baik untuk kegiatan prioritas maupun kegiatan penunjang.

Untuk menuju Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tersebut, perlu ditetapkan terlebih dahulu Indikator Kinerja Program sebagai Indikator Sasaran

Pembangunan yang ingin dicapai pada akhir periode pembangunan 2010-2014, yaitu sebagai berikut :

Indikator Kinerja Program 1-

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

- 1) Meningkatnya pengelolaan sumber daya Pos dan Informatika ;
- 2) Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan pengguna sumber daya Pos dan Informatika terhadap regulasi yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya tersebut ;
- 3) Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya Pos dan Informatika ;
- 4) Meningkatnya tumbuh-kembangnya industri Pos dan Informatika dalam negeri yang menghasilkan produk yang layak secara teknis ;
- 5) Tercapainya standar kelayakan teknis dan kualitas layanan Pos dan Informatika bertaraf internasional ;
- 6) Meningkatnya interoperabilitas pada layanan perangkat, aplikasi dan konten;
- 7) Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi pemanfaatan sumber daya dan standardisasi pos dan informatika.

Indikator Kinerja Program 2-

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

- 1) Meningkatnya ketersediaan layanan pos dan Informatika di seluruh wilayah Indonesia ;
- 2) Meningkatnya keterjangkauan layanan pos dan Informatika bagi masyarakat ;
- 3) Meningkatnya kualitas layanan pos dan Informatika ;
- 4) Meningkatnya sistem keamanan jaringan pos dan Informatika ;
- 5) Meningkatnya keberagaman jenis layanan pos dan Informatika ;
- 6) Meningkatnya kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan dan transparansi bagi pelaku industri pos dan Informatika ;
- 7) Meningkatnya mutu layanan pemerintah terhadap industri pos dan Informatika;
- 8) Menigkatnya kepatuhan masyarakat terhadap regulasi penyelenggaraan pos dan informatika ;
- 9) Menurunnya tingkat kesenjangan digital ;
- 10) Meningkatnya e-literasi masyarakat pada daerah perbatasan, terpencil, tertinggal dan paska konflik.

Indikator Kinerja Program 3-

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

- 1) Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan aplikasi e-government pada instansi pemerintah pusat dan daerah ;

- 2) Meningkatnya perluasan penerapan dan peningkatan kualitas layanan dan keberagaman layanan aplikasi e-business terutama bagi pelaku usaha kecil menengah / UKM dll ;
- 3) Meningkatnya keberagaman aplikasi dan konten sehat bagi masyarakat ;
- 4) Meningkatnya keteraturan, ketertiban dan keamanan pemanfaatan layanan aplikasi dan konten ;
- 5) Meningkatnya produktifitas pemanfaatan sarana dan prasarana aplikasi telematika pada kegiatan ekonomi dan peradaban.

Indikator Kinerja Program 4 -

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

- 1) Meningkatnya ketersediaan dan keberagaman konten informasi publik yang bersifat mendidik, mencerahkan, memberdayakan dan dalam kerangka NKRI ;
- 2) Meningkatnya kelancaran komunikasi dan informasi publik kepada masyarakat dan semakin terakomodasinya aspirasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik ;
- 3) Meningkatnya kemudahan masyarakat dalam menjangkau informasi publik;
- 4) Meningkatnya pemanfaatan ruang publik (*public equal opportunity*) sebagai media komunikasi masyarakat dalam mempertemukan aspirasi berbagai pihak dalam masyarakat ;
- 5) Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membangun *socio-harmony, National Character Building* dan ketahanan masyarakat dalam kerangka NKRI melalui media komunikasi publik ;
- 6) Meningkatnya citra positif Indonesia di tingkat internasional ;
- 7) Meningkatnya peran lembaga komunikasi dalam penyebaran informasi.

Indikator Kinerja Program 5 -

Program Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika

- 1) Meningkatnya karya-karya riset dalam bidang komunikasi dan informatika yang bermanfaat dan terpercaya ;
- 2) Meningkatnya pemanfaatan karya riset oleh masyarakat dan industri ;
- 3) Meningkatnya hasil karya riset yang mengakomodasi kebutuhan konsumen ;
- 4) Meningkatkan karya riset menjadi acuan penyusunan kebijakan publik bidang komunikasi dan informatika ;
- 5) Berkembangnya TIK nasional berbasis riset TIK ;
- 6) Meningkatnya kualitas dan kuantitas jumlah SDM komunikasi dan informatika yang profesional sesuai kompetensi dan profesi bidang komunikasi dan informatika ;

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Informasi yang dikelola dengan baik akan menghasilkan pengetahuan yang sangat khas bagi suatu negara, sesuai dengan kondisi alam dan budaya, sehingga merupakan aset yang sangat berharga. Pengetahuan tersebut dapat dipergunakan sebagai landasan bagi semua kegiatan industri, perdagangan, manajemen, maupun sosial sehingga mampu memberikan nilai tambah yang tinggi bagi output kegiatan-kegiatan tersebut. Melalui peran pemerintah dalam pemberdayaan informasi diharapkan dalam jangka panjang akan dapat terbentuk masyarakat Indonesia yang semua kegiatannya didasarkan pada pengetahuan, baik yang diperolehnya dari pengalaman sendiri maupun dari sumber yang memuat pengalaman, pemikiran, analisis orang lain. Dengan arah kebijakan yang tepat sangat besar harapannya bidang komunikasi dan informatika akan sangat berperan dalam melakukan transformasi menuju ke masyarakat pengetahuan tersebut.

Terkait dengan rantai nilai komunikasi dan informatika, perlu dirumuskan arah kebijakan yang dikaitkan dengan tahap-tahap pada rantai nilai tersebut supaya nilai tambah yang diberikan pada tiap tahap rantai nilai adalah maksimal. Dengan mempertimbangkan fenomena konvergensi dari telekomunikasi, internet dan media yang terjadi saat ini, kecuali di sektor pos, arah kebijakan bidang komunikasi dan informatika tidak lagi membedakan adanya sektor-sektor telekomunikasi, pers, penyiaran, media yang vertikal tersebut mengingat media apa saja telah dapat dipergunakan untuk menyampaikan informasi apa saja. Dalam era konvergensi, pemisahan yang justru lebih tampak jelas adalah secara horisontal yang membedakan sumberdaya, infrastruktur, jasa, dan kandungan informasi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Komunikasi dan Informatika

Memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan serta pengembangan komunikasi dan informatika nasional, maka rumusan arah kebijakan dalam Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014 ini adalah sebagai berikut:

- a. Memanfaatkan sumber daya komunikasi dan informatika secara optimal. Sumberdaya dan struktur teknologi informasi dan komunikasi adalah sangat terbatas sehingga perlu dimanfaatkan secara efektif dalam usaha memperoleh hasil yang optimal bagi keseluruhan pemangku kepentingan yaitu negara, pebisnis dan masyarakat. Pemberian hak penggunaan sumberdaya tersebut pada satu sisi harus dilakukan secara selektif dengan

komitmen yang memenuhi asas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; pada sisi yang lain harus dapat dialokasikan dengan cepat dan bertanggung jawab.

- b. Membentuk iklim penyelenggaraan layanan pos, komunikasi dan informatika. Untuk menghasilkan layanan pos, komunikasi dan informatika yang terjangkau, berkualitas dan aman kepada seluruh masyarakat, diperlukan peran swasta yang memperoleh izin penyelenggaraan melalui pembukaan peluang usaha oleh pemerintah sedemikian hingga tercipta pasar dengan sistem kompetisi yang sehat, yang menguntungkan bagi pengusaha dan masyarakat.
- c. Menentukan standar alat, layanan dan menjaga kepatuhan penggunaan. Hubungan antar sumber dan pengguna informasi adalah berbentuk macam-macam jaringan yang tersambung satu sama lain untuk menghasilkan efisiensi layanan secara nasional. Untuk menjamin terjadinya interkoneksi jaringan dan interoperabilitas layanan diperlukan kepatuhan terhadap standar alat dan layanan beserta pengawasan terhadap praktek lapangan dalam usaha mencegah terjadinya saling-ganggu.
- d. Menyediakan dan menyebarkan informasi yang bermanfaat. Pemberdayaan informasi oleh pemerintah dilakukan dengan mengingat fungsi pemerintah sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihasilkan oleh pemerintah perlu dikumpulkan dan dibuat tersedia kepada masyarakat untuk diambil (pull) pada saat dibutuhkan. Sementara itu, informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat harus juga disebarkan melalui ruang publik yang harus disediakan oleh semua penyelenggara komunikasi dan informatika serta ruang privat yang sesuai dengan peruntukannya.
- e. Meratakan layanan informasi dan memberdayakan masyarakat. Untuk mempercepat pemerataan layanan dan kemampuan pemanfaatan informasi diperlukan tindakan afirmatif oleh pemerintah melalui pembangunan infrastruktur, jasa dan kandungan informasi untuk daerah-daerah yang kurang layak secara ekonomis bagi penyelenggara. Usaha-usaha pembangunan kapasitas sumberdaya manusia juga merupakan bagian yang terkait erat dengan pembangunan fisik untuk mencapai tingkatan nilai komunikasi yang lebih tinggi sehingga terjadi transformasi sosial. Dalam hal ini peran lembaga komunikasi sosial didorong dan dikembangkan melalui pendekatan kearifan lokal.
- f. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia dan penelitian dan pengembangan komunikasi dan informatika. Untuk meningkatkan manfaat dari komunikasi dan informasi, diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten sehingga dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kekhasan Indonesia untuk peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi. Di samping itu juga diperlukan kemampuan sumberdaya manusia dalam melakukan penelitian sehingga dapat menghasilkan

kebijakan yang terbaik bagi semua pemangku kepentingan dengan melihat pada permasalahan yang dihadapi dan strategi penyelesaian yang menguntungkan bangsa dan negara.

- g. Mendorong industri TIK dalam negeri. Untuk menjamin kepentingan bangsa dan negara, penyelenggaraan layanan komunikasi dan informatika harus dapat dilaksanakan secara merata oleh bangsa Indonesia dengan cara mengembangkan industri perangkat, jasa, dan konten nasional. Dengan demikian rantai pasok kegiatan ekonomi dalam negeri terkait dengan bidang komunikasi dan informatika dapat diperpanjang, sehingga efek pengalinya bertambah besar. Hal ini penting dalam rangka meningkatkan peran bidang komunikasi dan informatika dalam perekonomian nasional yang dapat dilihat dari kontribusi bidang ini terhadap PDB nasional. Makin panjangnya rantai pasok dalam negeri akan dapat membuat kontribusi terhadap PDB menjadi semakin tinggi.

3.3. Program dan Anggaran

3.3.1. Program Prioritas

Pada tahun 2010, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan sebanyak 5 (lima) Program *Utama*/Prioritas seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 4 :
Program Utama/Prioritas Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010

KODE			PROGRAM
Fungsi	Sub Fungsi	Program	
01	01	16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik
04	09	01	Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika
04	09	02	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika
04	09	03	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi
08	03	01	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Sedangkan pada tahun 2011- 2014, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan sebanyak 4 (empat) Program Teknis seperti yang dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5 :
Program Teknis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2011-2014

KODE			PROGRAM
Fungsi	Sub Fungsi	Program	
*	*	*	Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika
*	*	*	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika
*	*	*	Program Pengembangan Aplikasi Informatika
*	*	*	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

Program teknis tersebut sejalan dengan pelaksanaan restrukturisasi program dan kegiatan tahun 2010-2014 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

3.3.2. Program *Pendukung* yang menampung Kegiatan Penunjang

Pada tahun 2010, Kementerian Kominfo telah menetapkan sejumlah kegiatan penunjang di tingkat satuan-satuan kerja, yang tertampung di dalam 6 (enam) Program Pendukung seperti dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 6 :
Program Pendukung Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010

KODE			PROGRAM
Fungsi	Sub Fungsi	Program	
01	01	09	Penerapan Pemerintahan Yang Baik
01	01	10	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara
01	01	12	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan
01	01	13	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
01	01	17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
10	05	01	Program Pendidikan Kedinasan

Nomenklatur Program Pendukung tersebut seiring dengan restrukturisasi program dan kegiatan yang pelaksanaannya mulai tahun 2011, akan berubah menjadi kelompok program pendukung/generik yang berlaku 2011-2014 seperti tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 7 :
Program Pendukung/Generik Kementerian Kominfo
Tahun 2011-2014

KODE			PROGRAM
Fungsi	Sub Fungsi	Program	
*	*	*	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika
*	*	*	Program Penelitian dan Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika
*	*	*	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika
*	*	*	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

3.3.3. Kebutuhan Anggaran Tahun 2010

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor .7 Tahun 2005. Di dalam RPJMN 2004-2009 tersebut, telah ditetapkan Nomenklatur Program-program pembangunan yang menjadi acuan dan dasar bagi setiap Kementerian Negara/Lembaga dalam mewadahi seluruh kegiatan pembangunan di bidangnya masing-masing.

Berkenaan dengan nomenklatur program tersebut, terdapat 11 Program yang menjadi wadah seluruh kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, baik secara sendiri maupun secara koordinasi dan sinergi dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta dan masyarakat.

Program-program pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut terdiri dari:

1) Kelompok Program Utama/Prioritas:

- a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik.
- b. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
- c. Program Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika.
- d. Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika.
- e. Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2) Kelompok Program Pendukung/Penunjang:

- a. Program Penerapan Pemerintahan yang Baik.
- b. Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara.

- c. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalksanaan.
- d. Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur.
- e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara
- f. Program Pendidikan Kedinasan.

Mengingat tahun 2010 merupakan tahun transisi dari RPJMN 2010-2014, maka program-program yang menjadi wadah kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2010 masih berpedoman kepada nomenklatur program RPJMN Tahun 2004-2009 dan visi dan misi Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2004-2009 sebagaimana telah disempurnakan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan informatika Nomor 38 Tahun 2008, demikian juga tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika masih berdasarkan kepada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.

Berdasarkan kondisi tersebut, terkait dengan alokasi program dan kegiatan tahun 2010, pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan kesepakatan Triparties antara Departemen Keuangan, Kemenneg PPN/Bappenas dan Departemen Kominfo, tanggal 29 April 2009 dan SE Menkeu No. 1927/MK.02/2009, tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara 2010, serta SE Menkeu Nomor SE-2678/MK.01/2009, tanggal 24 September 2009, tentang Pagu Definitif 2010.

Tabel 8 :
Rencana Kerja dan Anggaran *Kegiatan Prioritas* Berdasarkan Pagu Definitif Tahun 2010.

KODE			PROGRAM	PAGU 2010 (Rp)
Fgs	Sub Fgs	Prog		
1	1	16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	72,080,500,000
4	9	1	Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika	34,444,500,000
4	9	2	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	1,581,094,306,000
4	9	3	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	178,989,200,000
8	3	1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	106,202,300,000
JUMLAH				1,972,810,806,000

Tabel 9 :
Rencana Kerja dan Anggaran Kegiatan Penunjang
di dalam Program *Utama dan Program Pendukung*
Berdasarkan Pagu Definitif Tahun 2010

KODE			PROGRAM	PAGU 2010 (Rp)
Fgs	Sub Fgs	Prog		
01	01	09	Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	280.834.700.000
01	01	10	Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara	9.743.500.000
01	01	12	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	7.261.200.000
01	01	13	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	19.412.300.000
01	01	16	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	7.941.300.000
01	01	17	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara	10.529.700.000
04	09	01	Penyelesaian Restrukturisasi Pos dan Telematika	332.786.000.000
04	09	02	Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pos dan Telematika	141.910.400.000
04	09	03	Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi	18.149.500.000
08	03	01	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	5.525.700.000
10	05	01	Program Pendidikan Kedinasan	5.070.000.000
JUMLAH				839.164.300.000

3.3.4. Kebutuhan Anggaran Tahun 2011 s/d 2014

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana pembangunan nasional disusun dengan penetapan Rencana Tahunan (Rencana Kerja Pemerintah), Rencana Kerja Jangka Menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN), dan Rencana Jangka Panjang (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/RPJPN). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025.

Rencana Kerja Pemerintah disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Pemerintah, sedangkan rencana kerja jangka menengah disusun dan ditetapkan setiap 5 tahun dengan Peraturan Presiden, sedangkan rencana jangka panjang disusun dan ditetapkan setiap 20 tahun dengan Undang-Undang.

Merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), maka setiap Kementerian Negara/Lembaga harus menyusun rencana kerja jangka pendek (Renja K/L), Rencana Kerja Jangka Menengah (Renstra K/L) dan Rencana Kerja Jangka Panjang Kementerian Negara/Lembaga.

Mengacu kepada mekanisme dan prosedur perencanaan tersebut, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menyusun Rencana Strategis Tahun 2010 - 2014 dengan memperhitungkan kerangka makro dan mikro dari situasi dan kondisi global, baik yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal Kementerian, sekaligus mengantisipasi pembiayaan melalui pola prognosis perkiraan pembiayaan per tahun) untuk lima tahun ke depan. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Selain itu juga dalam rangka mengantisipasi perkembangan teknologi yang menuju ke era konvergensi, maka di dalam rencana strategis 2010 - 2014 telah ditetapkan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta capaian utama pembangunan komunikasi dan informatika 2010-2014.

Mencermati perkembangan teknologi yang konvergen sebagaimana tersebut, maka perkiraan kebutuhan anggaran pembangunan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan melalui Program Teknis 2011-2014, dapat diperhitungkan sebagaimana tercantum di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 10:
Rencana Kerja dan Anggaran
Kegiatan di dalam Program Teknis Tahun 2011 s.d. 2014

(dalam rupiah)

No.	PROGRAM	PAGU 2011	PAGU 2012	PAGU 2013	PAGU 2014
1	Program Pengelolaan Sumberdaya dan Perangkat Pos dan Informatika	583.190.000.000	753.990.000.000	967.480.000.000	1.234.350.000.000
2	Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika	1.673.820.000.000	1.827.070.000.000	2.058.280.000.000	1.928.950.000.000

3	Program Pengembangan Aplikasi Informatika	257.710.000.000	201.700.000.000	202.970.000.000	257.520.000.000
4	Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik	230.750.000.000	286.900.000.000	354.280.000.000	434.140.000.000
	TOTAL	2.745.470.000.000	3.069.660.000.000	3.583.010.000.000	3.854.960.000.000

Sedangkan perkiraan rencana kebutuhan anggaran kegiatan pendukung/ penunjang tahun 2011-2014 ditetapkan melalui pencermatan terhadap Program Generik tahun 2011 dan progonis setiap tahun ke depan. Rincian kebutuhan anggaran pembangunan pertahun sebagaimana tercermin di dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11:
Rencana Kerja dan Anggaran
Kegiatan di dalam Program Generik Tahun 2011-2014

(dalam rupiah)

	PROGRAM	TAHUN 2011	TAHUN 2012	TAHUN 2013	TAHUN 2014
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	160.900.000.000	206.080.000.000	260.300.000.000	310.900.000.000
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	25.560.000.000	30.140.000.000	36.190.000.000	43.400.000.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	15.000.000.000	18.000.000.000	21.600.000.000	25.920.000.000
4	Program Penelitian dan Pengembangan SDM Kominfo	188.580.000.000	228.590.000.000	282.140.000.000	331.780.000.000
	TOTAL	390.040.000.000	482.810.000.000	600.230.000.000	711.000.000.000

BAB IV

MEKANISME PERENCANAAN, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN

4.1. Mekanisme Perencanaan

Undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang tata cara penyusunan rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan.

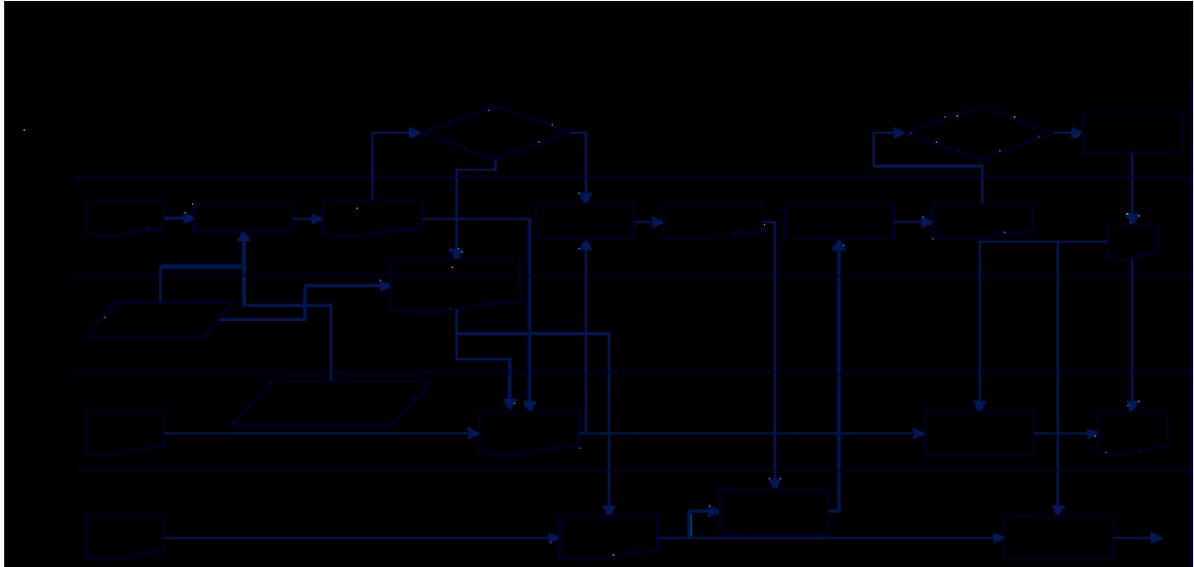
Rencana Pembangunan dibagi ke dalam tiga periodisasi : (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) ; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ; dan (3) Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah(RKP). Dalam rangka mengoptimalkan peran masyarakat, maka salah satu tahapan dalam proses perencanaan adalah Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat.

RPJP memuat visi,misi, dan arah pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. RPJP lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan Rencana Jangka Menengah dan Tahunan.

RPJM Nasional adalah Rencana Pembangunan Nasional untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas presiden yang disusun dengan berpedoman pada RPJP. Dengan demikian tahap awal dari penyusunan RPJM Nasional adalah penjabaran visi misi dan program prioritas nasional ke dalam rancangan awal. Rancangan awal ini dijadikan sebagai pedoman bagi semua Kementerian Negara/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis. Draft RPJM Nasional disusun dengan menggunakan Renstra Kementerian Lembaga dan menjadi bahan bagi Musrenbang Jangka Menengah. Rancangan Akhir disusun dengan mengakomodasi hasil Musrenbang kemudian ditetapkan menjadi RPJM Nasional.

Perkembangan Perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait (stakeholders) dengan prakarsa tersebut. Komitmen semua pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan program dan kegiatan.

Siklus Perencanaan Nasional sebagai berikut :



Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam penyusunan perencanaan dilaksanakan melalui siklus dan mekanisme sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nasional terkait dengan pembangunan komunikasi dan informatika, dilaksanakan melalui penyelenggaraan Rapat Koordinasi Daerah Komunikasi dan Informatika (RAKORDA KOMINFO), dan Rapat Koordinasi Nasional Komunikasi dan Informatika (RAKORNAS KOMINFO).

RAKORDA KOMINFO dilaksanakan bersama-sama dengan Dinas/Badan yang menangani tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah propinsi di wilayah Regional Indonesia Bagian Barat, Tengah dan Timur, baik propinsi maupun kabupaten/kota. Tujuan dari diselenggarakannya RAKORDA KOMINFO tersebut untuk : 1) menciptakan persamaan persepsi dalam pola pembangunan komunikasi dan informatika nasional ; 2) menciptakan sinergi dan integrasi program dan kegiatan pembangunan komunikasi dan informatika, sehingga seluruh aktivitas pembangunan komunikasi dan informatika baik oleh instansi pemerintah pusat maupun daerah merupakan kekuatan yang mampu mewujudkan pencapaian pembangunan komunikasi dan informatika nasional, regional dan propinsi serta kabupaten kota; 3) mewujudkan jaringan komunikasi dan informatika yang mampu menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4) menjaring masukan dan pemikiran serta komitmen daerah dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan komunikasi dan informatika untuk mewujudkan masyarakat informasi Indonesia yang sejahtera berbasis pengetahuan.

RAKORNAS KOMINFO diselenggarakan bersama-sama dengan unsur pemerintah pusat, pemerintah propinsi, perwakilan Bappeda Propinsi, dan perwakilan Kabupaten/Kota yang menangani tugas dan fungsi bidang komunikasi dan

informatika, ditambah perwakilan dari komunitas komunikasi dan informatika (asosiasi dan mitra kerja).

Tujuan dari RAKORNAS KOMINFO untuk : 1) menciptakan sinergi dan integrasi serta komitmen dalam pembangunan komunikasi dan informatika nasional; 2) mengevaluasi langkah-langkah pembangunan yang telah dilaksanakan guna menemukan strategi program dan kegiatan untuk perbaikan ke depan; 3) fokus pembangunan komunikasi dan informatika nasional yang mendukung percepatan pencapaian pembangunan nasional melalui perwujudan masyarakat informasi Indonesia yang sejahtera.

Berasal dari konsep dan pemikiran yang dihasilkan dari RAKORDA dan RAKORNAS KOMINFO, disusun sebagai bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan komunikasi dan infomartika nasional tahunan dan lima tahunan. Dengan pola perencanaan demikian, maka perencanaan pembangunan komunikasi dan informatika nasional oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika secara substansi telah diperkuat dengan konsep pembangnan komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh daerah propinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

4.2. Pemantauan dan Pengendalian

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu : (1) penyusunan rencana; (2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian-bagian dari fungsi manajemen, yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberi umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan. Setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Sejalan dengan itu, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.

Pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pelaksanaan pembangunan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. **Pengendalian** dilakukan dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan kegiatan

Tindak lanjut pemantauan dan pengendalian merupakan kegiatan atau langkah-langkah operasional yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan dan rencana yang telah ditetapkan, antara lain : melakukan

koreksi atas penyimpangan kegiatan, akselerasi atas keterlambatan pelaksanaan, ataupun klarifikasi atas ketidak-jelasan pelaksanaan rencana. Dalam konteks ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika melengkapi aktivitas pemantauan melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan program (WASGRAM) secara terpadu oleh Inspektorat Jenderal. Kegiatan WASGRAM dilaksanakan guna memastikan tersusunnya program kerja Satuan-Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang realistis sesuai tupoksi masing-masing sehingga dapat memberikan landasan yang kuat bagi Kementerian untuk melaksanakan program-program pembangunan di bidang komunikasi dan informatika secara efektif dan *sustainable*. Sedangkan kegiatan “Gelar Pengawasan” merupakan upaya dalam rangka memastikan ditindaklanjutinya temuan-temuan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh aparatur pengawasan internal (Inspektoral Jenderal) maupun oleh aparatur pengawasan eksternal, sebagai muara dari kegiatan pengawasan.

Selain itu, dalam rangka mengoptimalkan dukungan pengawasan terhadap program-program Kementerian Komunikasi dan Informatika yang bersifat strategis, pengawasan fungsional oleh Inspektorat Jenderal juga akan lebih diarahkan kepada jenis “pengawasan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian Pimpinan Kementerian” sesuai Kebijakan Pengawasan Nasional APIP yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan pemantauan dan pengendalian dilakukan melalui metode yang sistematis, meliputi :

- 1) Evaluasi** dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan rencana pembangunan pada masa yang akan datang. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu : (1) evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkannya rencana pembangunan, dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya; (2) evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; (3) evaluasi pada pasca pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/ hasil/ dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan dari suatu program).

2) Laporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di alam proses pelaksanaan program dan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kondisi yang terjadi serta penentuan kebijakan yang relevan. Di dalam pelaksanaannya kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Berkala maksudnya ialah bahwa laporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), dan 6 (enam) bulan (semester) atau tahunan.

Sedangkan berjenjang maksudnya ialah, bahwa laporan dilaksanakan dari satu unit kerja paling bawah dalam organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi.

Selain itu laporan juga harus dilakukan kepada masyarakat, baik secara aktif maupun secara pasif. Secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik. Sedangkan laporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi, sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk mendapatkan hasil yang dapat memberikan informasi secara maksimal diperlukan bentuk format pelaporan yang memadai sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan perlu dipantau secara periodik melalui mekanisme pelaporan, agar target yang telah ditetapkan dalam rencana dapat dicapai.

Terkait dengan pelaksanaan laporan tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika melaksanakan sistem pelaporan melalui format Laporan bulanan, triwulan, tahunan dan LAKIP, dilengkapi dengan sistem pengendalian melalui rapat monitoring dan evaluasi secara periodik dan bertahap. Hasil pemantauan ini dipergunakan sebagai bahan evaluasi untuk keperluan pengendalian apabila terjadi penyimpangan dari target yang telah ditetapkan. Evaluasi dan pengendalian ini dilakukan dalam bentuk rapat kerja yang diikuti oleh semua penanggung jawab kegiatan.

Tidak kalah pentingnya dari keseluruhan aktivitas Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah terlaksananya kegiatan pembangunan bidang komunikasi dan informatika secara efektif dan akuntabel. Efektif mengandung makna bahwa hasil-hasil pembangunan tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan, sedangkan akuntabel merujuk pada upaya mencapai sasaran tersebut dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan, khususnya dalam pengelolaan anggaran pemerintah untuk bidang komunikasi dan informatika. Terkait dengan hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menetapkan komitmen untuk dalam hal pengelolaan keuangan negara memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI. Upaya ke arah tersebut akan memperoleh dukungan sepenuhnya dari kegiatan asistensi penyusunan Laporan Keuangan dan

review atas Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika oleh Inspektorat Jenderal.

Upaya mencapai akuntabilitas yang tinggi akan banyak bergantung pada tingkat profesionalisme dan integritas moral dari aparatur pelaksanaannya. Sehubungan dengan itu, maka sesuai dengan rumusan misi yang ke-2 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (yaitu "Mewujudkan birokrasi layanan komunikasi dan informatika yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi"), Inspektorat Jenderal juga akan memberikan dukungan sepenuhnya dalam hal pembinaan karakter dan budaya kerja pegawai di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2010 - 2014 dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Tahun 2010-2014 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis pada masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Kegiatan-kegiatan yang belum dapat dilaksanakan secara maksimal pada tahun 2009 akan dikompensasikan pada pelaksanaan Renstra 2010-2014.

Oleh karena itu, pembuatan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2014 adalah suatu kegiatan yang sangat penting. Kegagalan pencapaian sasaran-sasaran pada tahun-tahun awal pelaksanaan Renstra akan menyebabkan sasaran Rencana Strategis tahun 2010 - 2014 tidak tercapai.

Penyusunan Renstra 2010-2014 dilakukan dengan mengacu pada capaian Sasaran Strategis tahun 2004 - 2009 dan kondisi dinamis lingkungan global. Rencana Kegiatan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang terdapat di dalam Renstra Tahun 2010-2014 dan anggaran yang dibutuhkan telah berhasil disusun dengan dilengkapi prognosis. Dengan demikian menjadi jelas apakah setiap Sasaran Strategis sudah ada kegiatan yang melaksanakannya.

Target-target pencapaian Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika 2010-2014 dibuat cukup menantang. Diperlukan kerja keras dan sinergi semua pihak agar target-target tersebut dapat dicapai.

Agar pelaksanaan Kegiatan selalu berada pada jalur yang benar, maka pelaksanaan Renstra perlu dimonitoring dan dievaluasi secara periodik. Rapat Kerja evaluasi pencapaian target-target akan dilakukan pada triwulan, semesteran dan tahunan serta dioptimalkan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Jakarta, 29 Januari 2010.

MENTERI
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,


TIFATUL SEMBIRING